



LAPORAN

KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

SEKRETARIAT KPU KOTA BONTANG

Jl. Awang Long No. 68
Kel Bontang Baru
Kec. Bontang Utara
Kota Bontang



2025



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan Sekretariat KPU Kota Bontang dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat menjadi referensi upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di kota Bontang.

Bontang, 25 Januari 2025
Sekretaris KPU Kota Bontang



Bambang Rahmadhany, S.H
NIP. 197609052009021002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, WEWENANG, FUNGSI DAN KEWAJIBAN.....	1
1. Tugas.....	2
2. Wewenang.....	2
3. Fungsi.....	3
4. Kewajiban.....	4
5. Struktur Organisasi.....	4
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA.....	17
C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA.....	25
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	33
BAB IV PENUTUP.....	76
A. KESIMPULA.....	76
B. RENCANA TINDAK LANJUT.....	77
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	6
Tabel 2	8
Tabel 3	18
Tabel 4	23
Tabel 5	26
Tabel 6	33
Tabel 7	34
Tabel 8	35
Tabel 9	35
Tabel 10	36
Tabel 11	38
Tabel 12	39
Tabel 13	41
Tabel 14	41
Tabel 15	42
Tabel 16	43
Tabel 17	46
Tabel 18	46
Tabel 19	47
Tabel 20	48
Tabel 21	49
Tabel 22	50
Tabel 23	51
Tabel 24	52
Tabel 25	53
Tabel 26	54
Tabel 27	54
Tabel 28	56
Tabel 29	56
Tabel 30	58
Tabel 31	59
Tabel 32	60
Tabel 33	61
Tabel 34	62
Tabel 35	63
Tabel 36	63
Tabel 37	64
Tabel 38	65
Tabel 39	65
Tabel 40	66
Tabel 41	68
Tabel 42	68
Tabel 43	69
Tabel 44	70
Tabel 45	71
Tabel 46	73
Tabel 47	73
Gambar 1	5



Gambar 2	5
Gambar 3	37
Gambar 4	39
Gambar 5	40
Gambar 6	49
Gambar 7	55
Gambar 8	58
Gambar 9	61
Gambar 10	64
Gambar 11	70
Gambar 12	72
Gambar 13	72
Gambar 14	74

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk:

1. mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan sesuai ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan) secara langsung diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
2. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
3. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - a. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - b. Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - c. Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - e. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Bontang Tahun 2025 dengan Pagu sebesar Rp. 6.000.033.000,- dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 5.965101.910,- atau sebesar 99.42 persen. Data-data pendukung pengukuran akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum selama kurun waktu 1 tahun, didapat dari laporan tiap Triwulan dari UKE II di lingkungan KPU Kota Bontang

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan sesuai ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Pemilu anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Selain menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan demikian Komisi Pemilihan Umum memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang diukur melalui Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur dan Gambaran Tingkat keberhasilan pencapaian Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang selama tahun 2024.

B. TUGAS, WEWENANG, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang merupakan salah satu unit kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang terdiri dari Komisioner didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kota Bontang:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat KPU Kota Bontang berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota; dan

- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

4. Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kota Bontang mempunyai kewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris.

5. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban serta mengimplementasikan pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

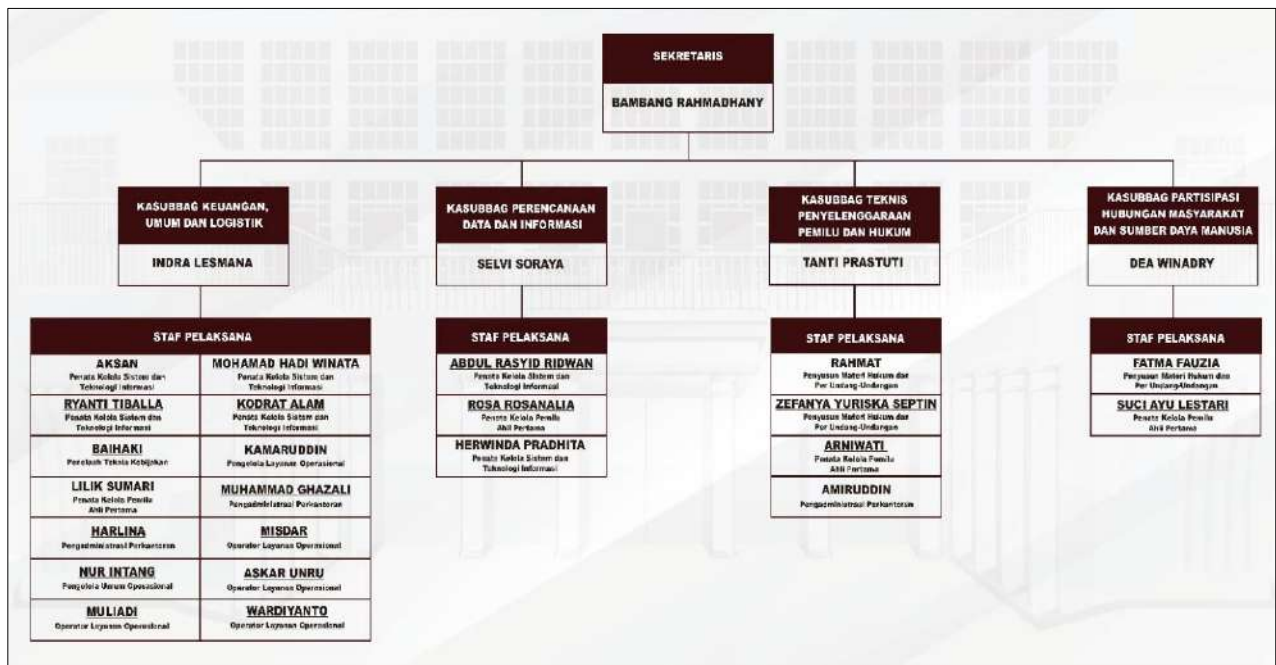
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu bersifat hirarkis, serta dalam menjalankan tugasnya dilakukan secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewengangnya.

Dalam meningkatkan tugas dan fungsi dari Sekretariat. KPU telah melakukan perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat KPU Kota Bontang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

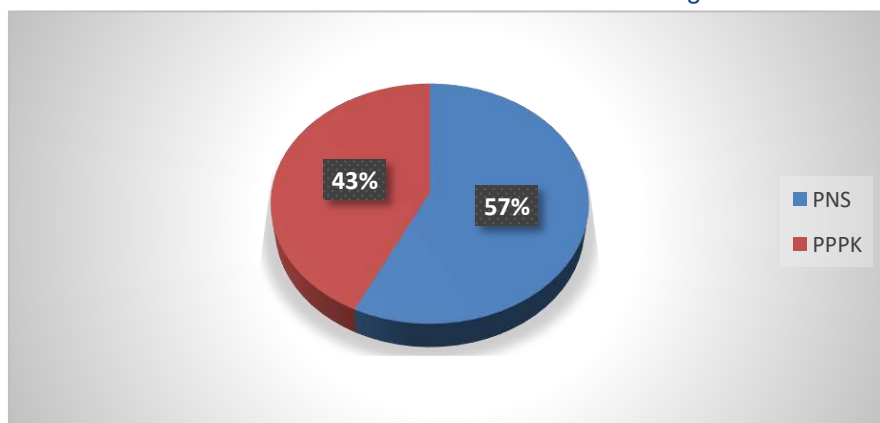
Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bontang



Sekretariat KPU Kota Bontang memiliki sumber daya manusia sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 16 (enam belas) orang;
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat sejumlah 12 (sepuluh) orang;

Gambar 2
Grafik SDM Sekretariat KPU Kota Bontang



Tabel 1
Jumlah SDM Sekretariat KPU Kota Bontang

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Sekretaris	1	Organik
2.	Kepala Sub Bagian	4	Organik
3.	Staf	23	Organik

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja Sekretariat KPU sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan sesuai dengan target kinerja sebagai ukuran keberhasilan.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Keberhasilan pelaksanaan Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 yang menjadi Prioritas Nasional. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga prioritas nasional tersebut yaitu:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
3. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Dalam mendukung Prioritas Nasional Komisi Pemilihan Umum Rencana Strategis dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”*

Misi:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2
Target Kinerja dari Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum							
1. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Keputusan KPU Kota Bontang yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman teknis	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%	100%	100%
2. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih							
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Berlaku					
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
3. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan							
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal Tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase KPU Kota Bontang Memfasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bontang secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Tersedianya Data Pemutakhiran Partai Politik di SIPOL secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal							
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	KPU Kota Bontang Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
		Jumlah Pemilih Pemula,	300	300	300	300	300

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	orang	orang	orang	orang	orang
B. Program Dukungan Manajemen							
1. Pengelolaan Keuangan							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kota Bontang	Persentase Pejabat perbendaharaan di Satker KPU Kota Bontang yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Bontang	90%	90%	90%	90%	95%
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Bontang	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bontang	B	B	B	B	B
	Terwujudnya	Persentase KPU	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Kota Bontang dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku					
	Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dengan Baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	2 Lembaga/Instansi	2 Lembaga/Instansi	2 Lembaga/Instansi	2 Lembaga/Instansi	2 Lembaga/Instansi
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia							
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan	Persentase Anggota KPU	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Kota Bontang yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku					
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan <i>Update</i>	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Bontang yang Disediakan secara Valid dan <i>Update</i>	100%	100%	100%	100%	100%
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kota Bontang	Persentase KPU Kota Bontang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Bontang yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%	10%	10%	10%	10%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Persentase Kualitas Tata Kelola	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang	Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan Internal KPU Kota Bontang							
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kota Bontang	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian	77%	79%	80%	82%	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	APIP KPU Kota Bontang dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bontang	Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti					
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan barang Milik Negara							
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase KPU Kota Bontang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	
7.	Pengelolaan Data dan Informasi							
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	
	Terwujudnya Penerapan e- <i>Government</i> secara Tepat	Persentase KPU Kota Bontang Menerapkan e- <i>Government</i> sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kota Bontang yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase KPU Kota Bontang yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kota Bontang yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam	20%	20%	25%	30%	35%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Periode Satu Tahun					
9. Pendataan DPT Berkelanjutan							
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Bontang sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	95%	95%	95%	95%
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Kota Bontang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Kota Bontang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis. KPU telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan berdasarkan rencana strategis KPU RI Tahun 2025-2029. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian

sasaran strategis, indikator kinerja dan target dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2025

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
1. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan			
	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Keputusan KPU Kota Bontang yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman teknis	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
2. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih			
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
3. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan			
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal Tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase KPU Kota Bontang Memfasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bontang secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 %
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Tersedianya Data Pemutakhiran Partai Politik di SIPOL secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target
4.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	KPU Kota Bontang Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	10 Kegiatan
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	300 orang
B. Program Dukungan Manajemen			
1.	Pengelolaan Keuangan		
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kota Bontang	Persentase Pejabat perbendaharaan di Satker KPU Kota Bontang yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
2.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi		
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Bontang	90%
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Bontang	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bontang	B
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase KPU Kota Bontang dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dengan Baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	2 Lembaga/ Instansi
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan <i>Update</i>	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Bontang yang Disediakan secara Valid dan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		<i>Update</i>	
4.	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kota Bontang	Persentase KPU Kota Bontang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Bontang yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%
	Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%
5.	Pemeriksaan Internal KPU Kota Bontang		
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kota Bontang	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan	77%

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target
	Kota Bontang dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bontang	APIP yang Ditindaklanjuti	
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan barang Milik Negara			
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase KPU Kota Bontang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan
7. Pengelolaan Data dan Informasi			
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	4 Kegiatan
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase KPU Kota Bontang Menerapkan e- Government sesuai SOP yang Berlaku	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kota Bontang yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase KPU Kota Bontang yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		yang Ada	
		Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kota Bontang yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	20%
9.	Pendataan DPT Berkelanjutan		
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Bontang sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Kota Bontang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	4 Kegiatan
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Kota Bontang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	4 Kegiatan

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Sekretariat KPU Kota Bontang adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang. Rencana Kerja Sekretariat KPU Kota Bontang memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran KPU Kota Bontang Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
076.01.CQ	076.01.CQ- Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2.435.653.000
6639	6639-Teknis Penyelenggaraan Pemilu	2.435.653.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
	dan Pemilihan	
076.01.WA	076.01.WA- Program Dukungan Manajemen	3.564.381.000
3355	3355-Pengelolaan Keuangan	3.219.980.000
3360	3360-Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344.401.000
6871	6871-Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.542.895.000
TOTAL		6.000.033.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah hasil nyata (*output/outcome*) yang dicapai suatu individu, unit kerja, atau organisasi dalam kurun waktu tertentu, diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan, menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, serta menjadi dasar akuntabilitas dan perbaikan kinerja di masa depan. Ini diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efisiensi anggaran, kepuasan pelanggan, dan lainnya.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi KPU. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi KPU.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, Sekretariat KPU Kota Bontang 42 (empat puluh dua) Sasaran Strategis dan 50 (lima puluh) Indikator Kinerja sesuai Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Bontang Tahun 2025. Berikut capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025.

Tabel 5
Realisasi dan Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Keputusan KPU Kota Bontang yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman teknis	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%	100%	100%
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara	Persentase KPU Kota Bontang Memfasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bontang secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 %	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	sesuai dengan jadwal Tahapan yang ditetapkan KPU				
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Tersedianya Data Pemutakhiran Partai Politik di SIPOL secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	KPU Kota Bontang Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	10 Kegiatan	12 Kegiatan	120%
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	300 orang	600 orang	200%
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kota Bontang	Persentase Pejabat perbendaharaan di Satker KPU Kota Bontang yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan	1 laporan	100%
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	100%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	95%	95%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		(TP/TGR)			
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	80,28%	89,3%
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Bontang	90%	90%	100%
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	96,39%	120%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Bontang	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bontang	B	B	100%
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase KPU Kota Bontang dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dengan	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota	2 Lembaga/ Instansi	2 Lembaga/ Instansi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Baik	Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan			
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan	1 laporan	100%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan <i>Update</i>	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Bontang yang Disediakan secara Valid dan <i>Update</i>	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kota Bontang	Persentase KPU Kota Bontang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Bontang yang Dibangun atau	10%	10%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai			
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%	100%	100%
	Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%	100%	100%
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kota Bontang	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Berwibawa (<i>clean governance</i>)				
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU Kota Bontang dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bontang	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	77%	100%
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	75	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase KPU Kota Bontang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan	1 laporan	100%
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%
	Terwujudnya Penerapan e-	Persentase KPU Kota Bontang Menerapkan	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	<i>Government</i> secara Tepat	<i>e- Government</i> sesuai SOP yang Berlaku			
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kota Bontang yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase KPU Kota Bontang yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%	100%	100%
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kota Bontang yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	20%	20%	100%
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Bontang sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	95%	100%
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Kota Bontang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan	KPU Kota Bontang Melaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	DPT Berkelanjutan	Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait			

Keterangan:

**Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi KPU RI menggunakan realisasi tahun 2024;*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 44 target; dan
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 3 target.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya penguatan peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku” adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Indikator Kinerja 1, 2, dan 3

IK 1	Persentase Keputusan KPU Kota Bontang yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman teknis				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%
IK 2	Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	93%	93%	100%	100%	100%
IK 3	Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

1. Persentase Keputusan KPU Kota Bontang Yang Disusun Dengan Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Pedoman Teknis

Dalam melaksanakan penyusunan dan penetapan keputusan Sekretariat KPU Kota Bontang secara terencana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia.

Setiap keputusan disusun melalui tahapan pembahasan internal, verifikasi kelengkapan administrasi, serta telaah kesesuaian substansi guna memastikan keputusan yang dihasilkan memenuhi aspek legal formal dan kebutuhan operasional.

2. Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat

KPU Kota Bontang telah melakukan pengelolaan dan penyajian informasi produk hukum melalui media resmi yang dimiliki KPU Kota Bontang dengan mengedepankan ketepatan waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi produk hukum yang ditetapkan dipublikasikan setelah proses pengesahan, sehingga dapat diakses oleh publik dan pihak-pihak yang membutuhkan terkait produk hukum tersebut. Adapun produk hukum KPU Kota Bontang dapat diakses di laman JDIH KPU Kota Bontang <http://jdih.kpu.go.id/kaltim/bontang>.

Produk hukum yang dikeluarkan KPU Kota Bontang selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7
Daftar Produk Hukum KPU Kota Bontang

No	Produk Hukum	Jumlah
1.	Surat Keputusan (SK) Ketua	25
2.	Surat Keputusan (SK) Sekretaris	17
3.	Berita Acara (BA) Ketua	120
4.	Berita Acara (BA) Sekretaris	0

3. Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum

KPU Kota Bontang selalu berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan KPU provinsi

Kalimantan Timur selaku suvervisi setingkat diatas guna mendapat petunjuk dan arahan agar segala kebijakan yang dilaksanakan tidak menimbulkan sengketa hukum dikemudian hari.

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat

Capaian indikator sasaran “Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat” adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Indikator Kinerja 4

IK 4	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	100%	100%	100%	100%

4. Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

KPU Kota Bontang berkomitmen untuk meningkatkan layanan informasi publik melalui PPID. PPID adalah Layanan Data, Informasi dan Dokumentasi kepada Publik yang disediakan baik secara *offline* maupun *online*. PPID Kota Bontang dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komis Pemilihan Umum Kota Bontang. Adapun Jumlah kegiatan pelayanan PPID pada tahun 2025 yaitu:

Tabel 9
Jumlah Pelayanan PPID KPU Kota Bontang

No.	Nomor Registrasi	Jenis Informasi	Ket
1.	01/HM.03-SD/PPID/6474/2025	Memohon data jumlah pemilih pemula berusia 17-21 Tahun, dan data partisipasi pemilih pemula di Pileg dan Pilkada 2024	
2.	02/HM.03-SD/PPID/6474/2025	Memohon salinan fotocopy ijazah SD,SLTP, SLTA dan Sarjana (S1) atas nama Andi Faisal S. Hasdam (Anggota DPRD Kota Bontang tahun 2019-2024 dan 2024-2029	
3.	03/HM.03-SD/PPID/6474/2025	Memohon D-Hasil Rekap	

		Perolehan Suara Pileg 2024	
4.	04/HM.03-SD/PPID/6474/2025	Memohon Data Pemilih Potensial Terbaru Data Tambahan Pemilih Pemula Bulan September	
5.	05/HM.03-SD/PPID/6474/2025	Memohon Data Pemilih Potensial Terbaru Bulan November	

Permintaan data melalui KPU Kota Bontang ini bisa diakses secara *offline* dengan datang langsung ke kantor KPU Kota Bontang atau secara *online* dengan masuk ke link <https://bontangkotappid.kpu.go.id/>.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Kiner 5

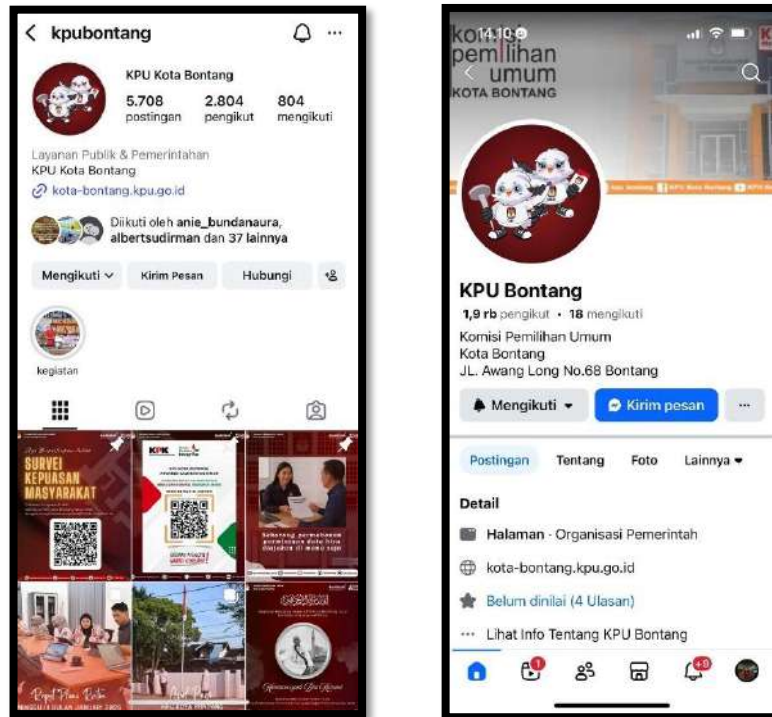
IK 5		Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

5. Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia

Sosialisasi tentang kepemiluan dan kegiatan KPU Kota Bontang selain dilakukan dengan tatap muka, juga menggunakan media sosial, mengingat saat ini media sosial adalah salah satu sarana untuk menyampaikan informasi yang efektif dan efisien dan dianggap paling cepat diakses oleh masyarakat. Diharapkan pemanfaatan media sosial ini dapat meningkatkan partisipasi publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya komunikasi publik yang efektif, transparan.

Adapun media sosial yang dikelola KPU Kota Bontang yaitu: Instagram @kpubontang, Facebook KPU Bontang, Youtube KPU Bontang dan Twitter @kpubontang.

Gambar 3
Media Sosial KPU Kota Bontang



SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal Tahapan yang ditetapkan KPU

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal Tahapan yang ditetapkan KPU” adalah sebagai berikut:

IK 6	Persentase KPU Kota Bontang Memfasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bontang secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	100%	100%

6. Persentase KPU Kota Bontang Memfasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bontang secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU

Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme konstitusional yang dilakukan untuk mengisi kekosongan keanggotaan DPRD Kota

Bontang yang terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan, baik karena mengundurkan diri, meninggal dunia, maupun sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAW bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi lembaga perwakilan rakyat agar tetap berjalan secara efektif.

Pada tahun 2025, anggota DPRD Kota Bontang tidak ada yang mengalami PAW sehingga KPU Kota Bontang tidak melakukan layanan administrasi terkait PAW.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku Pemilu dan Pemilihan

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku” adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Indikator Kinerja 7

IK 7	Persentase Tersedianya Data Pemutakhiran Partai Politik di SIPOL secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	100%	100%

7. Persentase Tersedianya Data Pemutakhiran Partai Politik di SIPOL secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemutakhiran data Parpol secara berkelanjutan melalui Sipol merupakan kegiatan penting sebagai upaya mitigasi penataan administrasi atas situasi perubahan kepengurusan Parpol di tiap tingkatan yang dinamis dan teknologi digitalisasi Sipol mempermudah proses tersebut. Penerimaan hasil pemutakhiran data Parpol secara berkelanjutan dilakukan dalam 2 (dua) semester aitu:

- Semester I diterima 3 (tiga) hari sebelum akhir Juni; dan
- Semester II diterima 3 (tiga) hari sebelum akhir Desember.

Kegiatan pemutakhiran data dan dokumen Parpol dalam Sipol dimulai dengan melakukan sosialisasi ke Parpol sekaligus meminta Parpol untuk menunjuk

Gambar 4
Sosialisasi Sipol



petugas penghubung yang memiliki wewenang untuk mengikuti alur pemutakhiran data mulai dari pengisian data, pengunggahan dokumen, sampai penyampaian data hasil dan melakukan komunikasi dengan KPU Kota Bontang melalui layanan *helpdesk* Sipol.

Berdasarkan Pengumuman KPU Kota Bontang Nomor:005/PL.01-Pu/6474/2026 Tentang Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025. Partai yang melakukan pemutakhiran sebagai berikut:

- Partai Golongan Karya
- Partai NasDem
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Demokrat
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Rakyat Adil Makmur

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal Pemilu dan Pemilihan

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal Pemilu dan Pemilihan” adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Indikator Kinerja 8 dan 9

IK 8 KPU Kota Bontang Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	10 Kegiatan	12 Kegiatan	120%

IK 9		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	300 Orang	600 Orang	200%

8. KPU Kota Bontang Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih

KPU Kota Bontang tahun 2025 gencar melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman demokrasi berupa edukasi tentang pentingnya Pemilu, proses pemungutan suara, dan peran pemilih dalam menentukan arah pembangunan daerah, meningkatkan pemahaman demokrasi berupa edukasi tentang pentingnya Pemilu, proses pemungutan suara, dan peran pemilih dalam menentukan arah pembangunan daerah serta membangun kesadaran politik dini dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini untuk membentuk pemilih yang kritis dan berkualitas pada masa depan.

Adapun kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi yaitu sebagai berikut:

- KPU Kota Bontang *Goes to School* merupakan program Gerakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan KPU, melalui peran sebagai pembina upacara SMA/SMK/MA se Kota Bontang dengan memberi pemahaman tentang kepemiluan dan peran OSIS sebagai miniatur demokrasi di sekolah.
- Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Sekolah dan Kampus, kegiatan ini dilaksanakan dengan metode interaksi, diskusi dan tanya jawab langsung dengan siswa dan mahasiswa di lingkungan sekolah dan kampus.

Gambar 5
Sosialisasi Pendidikan Pemilih



Tabel 13
Daftar Sosialisasi Pendidikan Pemilih

No	Nama Kegiatan	Tempat	Ket
1	SMA N 1 Kota Bontang	KPU Kota Bontang	
2	SMA N 2 Kota Bontang	Perpustakaan	
3	SMA N 3 Kota Bontang	BPU Kel. Lok Tuan	
4	SMK N 1 Kota Bontang	BPU Kel. Belimbing	
5	SMK N 2 Kota Bontang	BPU Kel. Tanjung Laut Indah	
6	SMK N 3 Kota Bontang	BPU Kec. Bontang Barat	
7	SMK N 4 Kota Bontang	BPU Kel. Bonles	
8	SMK Putra Bangsa	BPU Bontang Kuala	
9	STIT SYAM	BPU Bontang Kuala	
10	STITEK	BPU Gn. Telihan	
11	PKK Kota Bontang	BPU Kel. Kanaan	
12	STTIB	BPU Kel. Kanaan	

Dari Tabel diatas, dapat dilihat total kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Bontang sebanyak 12 kegiatan dari target 10 kegiatan dengan realisasi 120 persen, capaian tersebut melebihi dari target yang sudah ditetapkan.

9. Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih

Dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat serta mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan, KPU Kota Bontang secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih yang menysasar pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marginal.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih dalam proses demokrasi.

Selama tahun 2025, KPU Kota Bontang melakukan pendidikan pemilih dengan jumlah peserta dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Rekap Peserta Pendidikan Pemilih

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Ket
1	SMA N 1 Kota Bontang	50 Orang	
2	SMA N 2 Kota Bontang	50 Orang	
3	SMA N 3 Kota Bontang	50 Orang	
4	SMK N 1 Kota Bontang	50 Orang	
5	SMK N 2 Kota Bontang	50 Orang	

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Ket
6	SMK N 3 Kota Bontang	50 Orang	
7	SMK N 4 Kota Bontang	50 Orang	
8	SMK Putra Bangsa	50 Orang	
9	STIT SYAM	50 Orang	
10	STITEK	50 Orang	
11	PKK Kota Bontang	50 Orang	
12	STTIB	50 Orang	
Jumlah		600 Orang	

Dari Tabel diatas, dapat dilihat total peserta pendidikan pemilih yang dilaksanakan KPU Kota Bontang sebanyak 600 orang dari target 300 orang dengan persentase 200 persen realisasi, capaian tersebut melebihi target yang sudah ditetapkan.

Untuk Tahun 2025 fokus KPU Kota Bontang dalam memberikan pendidikan pemilih yaitu kepada pemilih pemula dengan menyasar sekolah dan kampus yang ada di Kota Bontang.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kota

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Indikator Kinerja 10

IK 10	Persentase Pejabat perbendaharaan di Satker KPU Kota Bontang yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku					
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
	-	-	-	100%	100%	100%

10. Persentase Pejabat perbendaharaan di Satker KPU Kota Bontang yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku

KPU Kota Bontang terus berupaya meningkatkan kompetensi dan kepatuhan pejabat perbendaharaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Bendaharaan di satuan kerja KPU Kota Bontang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas

tata kelola keuangan. Penyelesaian pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara tertib administrasi, tepat waktu, dan didukung dengan dokumen yang lengkap serta sah sesuai regulasi yang berlaku.

Sepanjang periode pelaporan, pejabat perbendaharaan telah melaksanakan proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara, standar akuntansi pemerintah, serta pedoman teknis yang ditetapkan oleh KPU dan Kementerian Keuangan. Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pertanggungjawaban dilakukan melalui pembinaan internal, koordinasi dengan pihak terkait, serta pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan secara optimal.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik” adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Indikator Kinerja 11

IK 11	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	2Laporan	2Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
IK 12	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
IK 13	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	95%	95%	100%
IK 14	Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)				
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	95%	95%%	100%

11. Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan mencerminkan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan pedoman teknis yang berlaku. Penyusunan laporan dilakukan secara periodik dan berjenjang dengan memperhatikan prinsip ketepatan waktu lengkap dan akurat.

KPU Kota Bontang konsisten melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Laporan tersebut sangat penting dalam menggambarkan kondisi keuangan serta pelaksanaan anggaran pada KPU Kota Bontang.

Sepanjang periode pelaporan Tahun 2025, KPU Kota Bontang telah menyusun dan menyampaikan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebanyak dua laporan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan jadwal, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

12. Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk memberikan masukan atas kendala dari pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2025, KPU Kota Bontang telah menyampaikan laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebanyak satu laporan ke KPU Prov Kaltim yang selanjutnya diteruskan ke KPU RI sesuai dengan jadwal, hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

13. Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan

Untuk mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan, KPU Kota Bontang telah melaksanakan peningkatan kapasitas pegawai sekretariat yang khusus menjadi operator Aplikasi Sakti modul pelaporan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam

pengolahan data keuangan, penyusunan laporan, serta pemahaman fitur di Aplikasi Sakti. Adapun peningkatan kapasitas yang biasa diikuti yaitu pelatihan yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

14. Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

KPU Kota Bontang melaksanakan rekap penatausahaan TP/TGR sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian negara yang timbul serta memastikan proses penyelesaian piutang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2025 sekretariat KPU Kota Bontang melakukan penyelesaian TP/TGR dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dengan keputusan Sekretaris KPU Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2025. Adapun obyek TGR RI tersebut merupakan kendaraan dinas yang hilang dicuri pada tahun 2013 dengan tanda bukti lapor nomor: LP/304/X/2014/Kaltim/Polres Bontang dan nilai penggantian kerugian negara sebagai berikut:

No	Pihak yang Bertanggung Jawab	Barang yang hilang		Nilai Penggantian Kerugian Negara
		Nama Barang	Merek/Type	
1.	Rosianto Herlambang	Sepeda Motor	Yamaha 1S7 JUPITER-MX	RP 3.670.000,-

Nilai penggantian kerugian negara sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah disetorkan ke Negara melalui Kementerian Keuangan.

SASARAN STRATEGIS

Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran

Capaian indikator sasaran “Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran” adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Indikator Kinerja 15

IK 15	Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	95%	95%	100%	100%

15. Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu

KPU Kota Bontang secara konsisten menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian laporan ini merupakan bentuk komitmen KPU Kota Bontang dalam menjaga tata kelola keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran dan didukung oleh dokumen administrasi yang lengkap serta sah. Proses penyusunan dan penyampaian laporan dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem pelaporan keuangan yang berlaku serta mengacu pada jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang. Untuk memastikan ketepatan waktu penyampaian laporan, KPU Kota Bontang melakukan pengendalian internal melalui koordinasi.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu” adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Indikator Kinerja 16

IK 16	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	100%	100%

16. Persentase KPU Kota Bontang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu

KPU Kota Bontang membayar gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu pembayaran merupakan salah satu indikator penting dalam pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan yang akuntabel.

Proses pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilaksanakan melalui perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tertib, didukung oleh kelengkapan data kepegawaian serta pemanfaatan sistem penggajian yang berlaku. Seluruh tahapan pembayaran dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketepatan administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur.

SASARAN STRATEGIS

Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan

Capaian indikator sasaran “Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan” adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Indikator Kinerja 17

IK 17	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	90%	100%

17. Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan

KPU Kota Bontang berupaya memberikan layanan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas layanan internal.

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepuasan, KPU Kota Bontang terus melakukan peningkatan kualitas layanan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur kerja, serta optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku. Dengan

meningkatnya tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan, KPU Kota Bontang diharapkan mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU” adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Indikator Kinerja 18

IK 18		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	90%	80.38%	89.3%

18. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Pada tahun 2025, KPU Kota Bontang menetapkan Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 90 persen. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi indikator tersebut realisasi yang dicapai sebesar 80.38 persen, sehingga realisasi IKPA KPU Kota Bontang hanya di 89.3 persen.

Belum tercapainya target IKPA tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Kualitas Perencanaan rendah sehingga ada deviasi besar dari realisasi anggaran tiap bulan (deviasi lebih dari 5%);
- Target penyerapan anggaran per belanja ada yang tidak tercapai sesuai indikator per triwulan;
- dispensasi penyampaian SPM;
- Pertanggungjawaban TUP sering terlambat; dan
- KKP tidak pernah digunakan.

Meskipun nilai capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran berada di bawah target, KPU Kota Bontang tetap berupaya menjaga prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pelaksanaan

anggaran telah diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas serta memastikan bahwa *output* kegiatan tetap tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik” adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Indikator Kinerja 19

IK 19	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Bontang				
Realisasi Tahun sebelumnya	Tahun 2025				
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	78,8%	88,78%	90%	88,53%	98%

19. Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Bontang

Persentase kepuasan Layanan KPU Kota Bontang menunjukkan tingkat penilaian publik terhadap kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, tingkat kepuasan masyarakat masih dibawah target walaupun nilainya sudah baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan, profesionalisme aparatur, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat harus lebih efektif. Meskipun demikian, masukan dan saran dari masyarakat tetap menjadi perhatian utama sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Gambar 6
Fasilitas Ramah Disabilitas



Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan, persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KPU Kota Bontang mencapai 88,53 persen, yang termasuk dalam kategori sangat baik, walaupun capaian ini dibawah dari target 90 persen dengan persentase realisasi 98 persen realisasi dari target yang sudah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kinerja yang diberikan telah sesuai dengan harapan, baik dari aspek kualitas pelayanan, ketepatan waktu, maupun sikap petugas. Beberapa faktor yang membuat membuat masyarakat memberi penilaian sangat baik diantaranya:

- Tersedianya layanan berupa *online* maupun *offline* PPID, layanan PDPB, JDIH;
- Pelaksanaan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Sarana dan prasarana yang ramah terhadap kaum disabilitas.

Terdapat pula saranan dan prasarana yang perlu dilakukan peremajaan sehingga dapat memaksimalkan kepuasan layanan ke masyarakat dan Sekretariat KPU Kota Bontang berkomitmen untuk meningkat kepuasan layanan.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku” adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Indikator Kinerja 20

IK 20		Indeks Reformasi Birokrasi			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	80%	96,39%	120%

20. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang diwujudkan dengan membentuk kelompok- kelompok kerja yang difokuskan pada 8 (delapan) area perubahan. Kelompok kerja ini merupakan bagian dari tim reformasi birokrasi yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Selanjutnya setelah terbentuk tim reformasi birokrasi, delapan area perubahan tersebut dibuatkan rencana aksi kegiatan reformasi birokrasi.

KPU Kota Bontang pada tahun 2025 memperoleh indeks reformasi birokrasi 96,39 dari target 80 dengan persentase 120 persen realisasi melebihi dari target yang sudah ditetapkan. Pencapaian dari angka tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- Tidak adanya pelanggaran selama tahun 2025 baik yang dilakukan Komisioner maupun dari Sekretariat;
- Banyak inovasi yang dibuat di area manajemen perubahan;
- Penataan dan publikasi peraturan perundang-undangan.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Indikator Kinerja 21

IK 21 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bontang					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	66,20	88,78	B	B	100%

21. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bontang

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yang diterima tahun 2025. KPU Kota Bontang memperoleh nilai SAKIP B (72,25) sesuai dengan target yaitu B dengan persentase 100 persen realisasi. Meski demikian terdapat catatan hasil evaluasi SAKIP yaitu:

- IKU KPU Kota Bontang belum sepenuhnya menyajikan informasi terkait cara pengukuran dan formulasi pengukuran yang tepat dan belum menyajikan informasi terkait definisi operasional, target dan Penanggung jawab;
- Laporan Kinerja yang disajikan belum sepenuhnya telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun berturut-turut;
- Laporan Kinerja yang disajikan belum sepenuhnya telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun berturut-turut;

- d. Tidak adanya pohon kinerja yang menggambarkan hubungan *crosscutting* pada dokumen perencanaan kinerja. misalnya sasaran kinerja terkait bimtek peraturan pemilu tidak hanya tanggungjawab subbagian hukum namun juga tanggung jawab subbagian parmas;
- e. Belum adanya tabel monitoring dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja, terdiri dari rencana kinerja, realisasi, kendala/hambatan, upaya yang dilakukan yang melibatkan seluruh bagian.

Dari catatan hasil evaluasi SAKIP tersebut di atas, KPU Kota Bontang berkomitmen untuk melakukan perbaikan di tahun 2026 dengan melaksanakan catatan dari hasil evaluasi tersebut.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang memadai” adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Indikator Kinerja 22

IK 22		Persentase KPU Kota Bontang dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

22. Persentase KPU Kota Bontang dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku

KPU Kota Bontang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku merupakan indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas perencanaan kinerja dan anggaran. Perencanaan program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, kebijakan KPU, serta dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, seperti Renstra, Rencana Kerja Tahunan, dan pedoman penyusunan anggaran.

Dalam pelaksanaannya, KPU Kota Bontang telah menyusun program dan kegiatan melalui mekanisme perencanaan yang terstruktur dan terkoordinasi, melibatkan unit kerja terkait serta memperhatikan keselarasan

antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan alokasi anggaran. Setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan organisasi dan prioritas strategis, serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator sasaran “Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan” adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Indikator Kinerja 23

IK 23 Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan					
Realisasi sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	2 Lembaga/Instansi	2 Lembaga/Instansi	100%

23. Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Dalam melaksanakan tahapan pemilu dan pemilihan KPU sebagai penyelenggara tidak hanya bekerja sendiri tapi dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak sehingga tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kerjasama bisa atas dasar perjanjian maupun tanpa perjanjian baik ketika ada tahapan maupun tidak ada tahapan.

Pada tahun 2025 disaat tidak ada tahapan, KPU Kota Bontang tetap rutin melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang ada di Kota Bontang guna mendukung kegiatan-kegiatan KPU seperti Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, dan sosialisasi-sosialisasi terkait peraturan tentang kepemiluan.

Untuk jumlah lembaga yang bekerja sama dengan KPU Kota Bontang berdasarkan target dari Perjanjian Kinerja sebanyak dua Lembaga/Instansi sesuai dengan target yaitu dua tidak dapat dijabarkan secara terperinci mengingat kerjasama antar lembaga tersebut tidak dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tapi secara koordinasi tetap berjalan.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik” adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Indikator Kinerja 24

IK 24		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%

24. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang transparan bertanggung jawab. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai instrumen pengendalian internal untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta target yang telah ditetapkan.

KPU Kota Bontang telah menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten” adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Indikator Kinerja 25

IK 25		Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	95%	95%	100%	100%	100%

25. Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan

Kompetensi pegawai dengan standar kompetensi penugasan merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, keterampilan masing-masing pegawai.

Penempatan pegawai di sekretariat KPU Kota Bontang ada beberapa yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia jika ingin disesuaikan. Namun hal ini tidak menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi dari kesekretariatan mengingat di KPU Kota Bontang membuat kegiatan peningkatan kapasitas SDM dengan pemateri/narasumber dari internal maupun eksternal.

Gambar 7
Kegiatan Peningkatan SDM



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM” adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Indikator Kinerja 26

IK 26		Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	97,5%	100%	100%	100%

26. Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu

Layanan administrasi untuk pegawai sekretariat di KPU Kota Bontang sudah berjalan dengan baik dan tepat waktu dan tidak terdapat kendala yang berarti, misalnya proses pemberkasan pegawai yang akan beralih dari Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dapat berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Selain itu pengelolaan administrasi yang lain seperti pengajuan cuti tahunan maupun cuti hamil cepat dan mudah.

Dari capaian terkait kemudahan layanan administrasi kepegawaian, KPU Kota Bontang berkomitmen mempertahankan capaian tersebut dalam memberikan layanan administrasi kesetiap pegawai dan akan melakukan evaluasi terkait hal-hal yang dianggap kurang maksimal.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku” adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Indikator Kinerja 27

IK 27		Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

27. Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku

KPU Kota Bontang yang pelaksanaan PAW sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan indikator kinerja yang mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi serta konsistensi penerapan tata kelola kelembagaan yang baik.

Tahun 2025 tidak terdapat anggota KPU Kota Bontang yang dilakukan PAW. Namun jika memang terdapat PAW untuk tahun-tahun berikutnya, bisa dipastikan proses PAW tersebut sesuai dengan peraturan guna menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga.

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan *Update*

Capaian indikator sasaran “Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan *Update*” adalah sebagai berikut:

IK 28 Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Bontang yang Disediakan secara Valid dan <i>Update</i>					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

28. Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Bontang yang Disediakan secara Valid dan *Update*

Dokumen pegawai menjadi hal mendasar sebagai bukti dari status kepegawaian pegawai tersebut. Di KPU Kota Bontang kelengkapan dokumen kepegawaian setiap saat dilakukan *update*. Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara penataan arsip kepegawaian, verifikasi kelengkapan dokumen, serta pembaharuan data pegawai, perubahan pendidikan, perubahan pangkat dan golongan.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Indikator Kinerja 29 dan 30

IK 29 Persentase KPU Kota Bontang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	100%	100%	100%	100%	100%
IK 30 Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Bontang yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	10%	10%	100%

29. Persentase KPU Kota Bontang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik

Untuk mendukung kegiatan kesekretariat dalam menjalankan tugas, KPU Kota Bontang menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan layak, misalnya pegawai yang tugas dan fungsinya dibagian administrasi dilengkapi perangkat komputer, termasuk fasilitas Printer di ruangan masing-masing.

KPU Kota Bontang berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana kerja dengan baik dengan melakukan pendataan dan *update* terkait kelengkapan yang perlu dilakukan perawatan atau perbaikan lebih lanjut. Dan untuk kenyamanan dalam bekerja, setiap ruangan dipasang pendingin ruangan.

30. Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Bontang yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai

KPU Kota Bontang dilengkapi dengan gedung kantor berlantai dua dengan satu ruang rapat, satu

Gambar 8
Kantor dan Gudang KPU Kota Bontang



media center, masing-masing ruangan komisioner, ruangan sekretaris dan subbagian. Selain itu terdapat pula satu gudang yang biasa digunakan untuk

menyimpan logistik pada saat tahapan Pemilu/Pemilihan. Status dari bangunan tersebut masih pinjam pakai dari Pemerintah Kota Bontang.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja” adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Indikator Kinerja 31

IK 31	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	100%	100%

31. Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja

Kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja merupakan kewajiban sebagai menggambarkan tingkat dukungan layanan perkantoran terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Bontang. Layanan perkantoran mencakup penyediaan sarana dan prasarana kerja, layanan administrasi umum, pemeliharaan fasilitas kantor, serta dukungan operasional lainnya yang diperlukan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja pegawai.

KPU Kota Bontang berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas layanan perkantoran sehingga dapat mendukung kelancaran tugas serta peningkatan kinerja.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Indikator Kinerja 32

IK 32		Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

32. Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang

Persuratan di KPU Kota Bontang dilakukan melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sistem ini memudahkan dikarenakan lebih efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya, dimana tidak dibutuhkan lagi surat dalam bentuk *hard* melainkan dalam file yang otomatis terkirim ke alamat tujuan.

Pada tahun 2025, KPU Kota Bontang telah melaksanakan kegiatan digitalisasi arsip berdasarkan Surat Sekjen KPU RI Nomor 1543/TU.05.3-SD/05/2025 perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini meliputi penataan arsip, alih media arsip statis dan dinamis, serta pengelolaan arsip digital melalui sistem informasi kearsipan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung tertib administrasi, efisiensi kerja, serta percepatan layanan informasi internal maupun eksternal.

Pelaksanaan digitalisasi arsip memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan arsip, antara lain kemudahan dalam penelusuran arsip, pengurangan risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan arsip dalam mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, digitalisasi arsip juga mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Indikator Kinerja 33

IK 33		Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

33. Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang

KPU Kota Bontang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan persidangan dan protokol, antara lain memaksimalkan ruang rapat yang digunakan dalam rapat Pleno baik Pleno terbuka maupun pleno rutin. Peningkatan kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Pelaksanaan layanan persidangan dan protokol dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan waktu, kelengkapan administrasi, dan kesiapan tempat.

Peningkatan kualitas layanan persidangan dan protokol memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengambilan keputusan. Layanan yang tertib dan profesional mendukung terselenggaranya kegiatan kelembagaan secara optimal,

meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme KPU Kota Bontang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Gambar 9
Ruang Pleno KPU Kota Bontang



SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Indikator Kinerja 34

IK 34 Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Bontang					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

34. Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Bontang

Keamanan dan ketertiban merupakan hal penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan kondusif di KPU Kota Bontang. Layanan keamanan dan ketertiban bertujuan untuk melindungi personel, aset, dokumen, serta menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan kelembagaan dari potensi gangguan keamanan.

KPU Kota Bontang telah melaksanakan layanan keamanan dan ketertiban secara berkesinambungan melalui pengaturan sistem pengamanan kantor, pengawasan akses masuk dan keluar, serta penjagaan terhadap aset dan fasilitas kantor.

Pengamanan di Kantor KPU Kota Bontang dilaksanakan oleh Jagat Saksana sebutan untuk Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) internal KPU. Pengamanan sendiri dilakukan 24 jam dengan sistem shift dan ketika masuk tahapan Pemilu atau Pilkada pengaman dibantu oleh personil dari Polres Kota Bontang.

Gambar 10
Anggota Pamdal KPU Kota Bontang



SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Indikator Kinerja 35

IK 35		Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

35. Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitas Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang

Layanan kesehatan bagi pegawai KPU Kota Bontang diserahkan dan didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan untuk penentuan fasilitas Kesehatan tingkat pertama diberikan ke masing-masing pegawai untuk menentukan. Khusus untuk tahapan KPU Kota Bontang melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan seperti pengecekan kesehatan, layanan emergency dan suplai Vitamin.

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kota Bontang” adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Indikator Kinerja 36

IK 36		Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	30%	30%	100%

36. Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran

Penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal terhadap realisasi anggaran merupakan bukti efektivitas pengendalian intern serta kualitas pengelolaan keuangan di KPU Kota Bontang. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran.

KPU Kota Bontang telah melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran, antara lain melalui penguatan pengendalian intern, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta melaksanakan dan menindaklanjuti atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan Berwibawa (*clean governance*)

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan Berwibawa (*clean governance*)” adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Indikator Kinerja 37

IK 37		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	80%	80%	100%

37. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

KPU Kota Bontang berkomitmen untuk menindaklanjuti pengaduan, masukan dan tanggapan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Menerima pengaduan masyarakat menjadi sarana penting untuk bahan evaluasi guna memperbaiki pemberian layanan yang baik.

Salah satu sarana KPU Kota Bontang untuk menerima masukan dari masyarakat yaitu dibuatnya kota kritik dan saran yang dapat digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. selain melalui kotak kritik dan saran, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan melalui media sosial resmi KPU Kota Bontang.

Gambar 11
Kotak Kritik dan Saran



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU Kota Bontang dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bontang

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan Berwibawa (*clean governance*)” adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Indikator Kinerja 38

IK 38 Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	70%	70%	77%	77%	100%

38. Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti

KPU Kota Bontang berkomitmen dalam penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP Baik dan Tepat Waktu, adapun ditindaklanjuti yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tersebut, sehingga penyelesaian dapat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Capaian ini menjadi bukti komitmen KPU Kota Bontang dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meminimalkan temuan berulang pada pemeriksaan berikutnya.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan” adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Indikator Kinerja 39

IK 39 Persentase KPU Kota Bontang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

39. Persentase KPU Kota Bontang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara

KPU Kota Bontang dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa berprinsip pada pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan anggaran secara optimal dan bertanggung jawab.

KPU Kota Bontang juga telah melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pengadaan guna memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas. Seperti mengikuti sekretariat dalam sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dimana saat ini KPU Kota Bontang telah memiliki 5 orang pegawai yang memiliki sertifikat PBJ.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)” adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Indikator Kinerja 40 dan 41

IK 40	Persentase KPU Kota Bontang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	95%	95%	100%	100%
IK 41	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	1Laporan	1Laporan	1 Laporan	100%

40. Persentase KPU Kota Bontang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

KPU Kota Bontang dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang material merupakan wujud dari kualitas tata kelola aset negara secara

akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan BMN yang tertib dan patuh menjadi dasar penting dalam menjaga nilai aset, mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, serta meminimalkan risiko kerugian negara.

Selama tahun 2025, KPU Kota Bontang telah melaksanakan pengelolaan BMN yang material secara tertib, mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengamanan dan pelaporan aset. Seluruh proses pengelolaan BMN dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku serta didukung oleh kelengkapan administrasi dan pencatatan yang akurat dalam sistem pengelolaan BMN.

41. Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Unit Akuntansi Pengguna Barang baik di tingkat satuan kerja maupun wilayah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih tersebut, yaitu melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dapat dilakukan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Aset dan persediaan General Ledger dan Pelaporan Periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2024 Nomor: 642/RT.01.2/6474/2024 KPU Kota Bontang telah melakukan BMN pada lingkup internal Kantor KPU Kota Bontang dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Bulan Desember Tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir

Capaian indikator sasaran “Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir” adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Indikator Kinerja 42

IK 42 KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%

42. KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir

Pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui proses pencermatan dan pemadanan data, meliputi penambahan pemilih baru, perbaikan elemen data, serta penghapusan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Selain itu, KPU Kota Bontang juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui layanan tanggapan dan masukan guna memastikan keakuratan data pemilih yang disusun.

Data ini disajikan melalui link cek DPT Online dan dapat diakses selama 24 jam. Data yang disajikan sesuai dengan data yang ditetapkan. Realisasi ini di bawah target yang telah ditetapkan karena awal tahun 2025 masih masuk dalam tahapan Pilkada, syarat dilakukannya PDPB yaitu tidak adanya tahapan Pemilu dan Pemilihan.

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Penerapan e- *Government* secara Tepat

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Penerapan e- *Government* secara Tepat” adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Indikator Kinerja 43

IK 43 Persentase KPU Kota Bontang Menerapkan e- <i>Government</i> sesuai SOP yang Berlaku					
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

43. Persentase KPU Kota Bontang Menerapkan e- Government sesuai SOP yang Berlaku

KPU Kota Bontang secara berjenjang menerapkan e-Government sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penerapan e-Government tersebut berhulu ke KPU RI yang diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai sistem dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Implementasi e-Government mencakup penggunaan aplikasi SAKTI, Emonev, Srikandi, SRUP, INAPROC V6, serta sistem pendukung pemilihan seperti Sidalih, Sipol, Sirekap. Yang semua aplikasi tersebut terintegrasi dan dikelola sesuai dengan ketentuan teknis dan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kota Bontang yang Terintegrasi

Capaian indikator sasaran “Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kota Bontang yang Terintegrasi dengan Baik” adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Indikator Kinerja 44

IK 44	Persentase KPU Kota Bontang yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai					
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	-	100%	100%	100%

44. Persentase KPU Kota Bontang yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU Kota Bontang menyediakan sarana dan prasarana kerja terutama yang mendukung penggunaan aplikasi seperti perangkat komputer dan jaringan internet yang memadai. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut diarahkan untuk menunjang efektivitas kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kualitas layanan kepada pemangku kepentingan.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM” adalah sebagai berikut:

Tabel 44
Indikator Kinerja 45 dan 46

IK 42	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	100%	100%
IK 43	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kota Bontang yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	20%	100%

45. Persentase KPU Kota Bontang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada

KPU Kota Bontang secara berkelanjutan melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM melalui pemanfaatan berbagai media pengembangan kompetensi yang tersedia. Peningkatan kompetensi tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan serta kebijakan yang berlaku di lingkungan KPU.

Pengembangan kompetensi SDM dilakukan melalui partisipasi dalam bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi, workshop, serta pemanfaatan media pembelajaran daring dan aplikasi pendukung yang disediakan oleh KPU RI maupun instansi terkait. Media kompetensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Gambar 12
Sosialisasi Aplikasi SIMPEL KPU



46. Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kota Bontang yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun

Sekretariat KPU Kota Bontang melakukan monitoring terhadap realisasi jam pelajaran yang telah ditempuh oleh pegawai. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan kompetensi selanjutnya. Dengan terpenuhinya jumlah jam pelajaran pengembangan kompetensi oleh pegawai, diharapkan kinerja individu dan organisasi semakin meningkat serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.

Untuk kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan melalui Simpel KPU yang terintegrasi dengan pelatihah-pelatihan dengan lembaga lain.

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku

Capaian indikator sasaran “Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku” adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Indikator Kinerja 47 dan 48

IK 47	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Bontang sesuai Ketentuan yang Berlaku				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	100%	100%
IK 48	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif				
	Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025	
	2022	2023	2024	Target	% Capaian
	-	-	-	95%	100%

47. Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Bontang sesuai Ketentuan yang Berlaku

KPU Kota Bontang melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta

berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kodim, Polres, Disdukcap, Lapas. Selama tahun 2025, KPU Kota Bontang menetapkan PDPB sebanyak 3 kali.

Gambar 13
Rapat Pleno PDPB 2025



48. Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif

Data yang akurat, mutakhir, dan Komprehensif adalah hal yang mutlak harus dipenuhi dan pemutakhiran data pemilih, hal ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan hak pilih, serta menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan.

Salah satu upaya KPU Kota Bontang dalam menyediakan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif yaitu menghilangkan data ganda yang ada dalam data pemilih Oleh karena itu, sebelum melakukan penetapan jumlah pemilih di PDPB tahun 2025 KPU Kota Bontang melakukan pembersihan data pemilih ganda tersebut sebelum dilakukan penetapan dalam rapat pleno terbuka.

Gambar 14
Sidalih Analisis Data Ganda

Wilayah	Jumlah
BONTANG UTARA	0
BONTANG SELATAN	0
BONTANG BARAT	0
Total	0

SASARAN STRATEGIS

Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku

Capaian indikator sasaran “Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku” adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Indikator Kinerja 49

IK 49		KPU Kota Bontang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

49. KPU Kota Bontang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan

KPU Kota Bontang melaksanakan persiapan pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persiapan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga instansi terkait data pemilih di luar tahapan pemilu.

Persiapan pendataan DPT Berkelanjutan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kodim, Polres Disdukcapil, Lapas dan Bawaslu, serta penyiapan perangkat pendukung dan sumber daya manusia. Selain itu, KPU Kota Bontang juga melakukan pencermatan dan pepadanan awal terhadap data kependudukan sebagai dasar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.

SASARAN STRATEGIS

Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan

Capaian indikator sasaran “Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan” adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Indikator Kinerja 50

IK 50		KPU Kota Bontang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait			
Realisasi Tahun sebelumnya			Tahun 2025		
2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	100%	100%	100%

50. KPU Kota Bontang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait

Pelaksanaan pendataan DPT Berkelanjutan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, Seperti Kodim Bontang, Polres Bontang, Disdukcapil Kota Bontang, Lapas Kelas IIA Bontang, dan Bawaslu Kota Bontang. Sinergi ini bertujuan untuk memperoleh data kependudukan yang valid, melakukan pencermatan dan pemadanan data, serta menindaklanjuti masukan status pemilih, seperti pemilih baru, pemilih meninggal dunia, pindah domisili, maupun perubahan elemen data.

Gambar 15
Rapat Koordinasi PDPB



Perbandingan realisasi anggaran KPU Kota Bontang tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 48
Perbandingan Realisasi anggaran 2024 dengan 2025

NO	Program/Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	076.01.CO-Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38.034.219.000	23.413.959.778	61,56%	2.435.653.000	2.405.644.294	98.77%
2.	6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	25.657.790.000	11.211.593.943	43,70%	2.435.653.000	2.405.644.294	98.77%
3.	076.01.WA-Program Dukungan Manajemen	2.685.536.000	2.612.596.022	97,28%	3.564.381.000	3.559.457.616	99.86%
4.	3355 Pengelolaan Keuangan	2.548.374.000	2.475.781.372	97,15%	3.219.980.000	3.217.642.616	99.93%
5.	3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan	137.162.000	136.814.650	99,75%	344.401.000	341.815.000	99.25%



NO	Program/Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Dukungan Sarana Prasarana						
6.	6871 Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1.542.895.000	1.500.372.665	97,24%	1.542.895.000	1.500.372.665	97.24%
TOTAL		40.719.755.000	26.026.555.800	63.92%	6.000.033.000	5.965.101.910	99.42%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULA

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 atau pelaksanaan tugas dan fungsi, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kota Bontang Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2025-2029 yang ditungakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun capaian realisasi kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2025 dapat disimpulkan dan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja kedepan secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2025 akan menjadi bahan input bagi penilaian RB dan penilaian AKIP Tahun 2025.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Bontang Tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) dari indikator kinerja yang capaiannya diatas 100% sampai dengan Tahun 2025, yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, capaian ini sebesar 121% dengan realisasi 96,39 dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 80;
 - b. Nilai SAKIP KPU Kota Bontang Tahun 2025, Capaian ini sebesar 103% dengan realisasi 72,2 dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 70;dan
 - c. Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU kota Bontang. Capaian ini sebesar 122,9% dengan realisasi 88,3 dan telah melampaui pencapaian target tahunan yang ditetapkan sebesar 72;
2. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya dibawah 100% sampai dengan Tahun 2025, yaitu:
 - a. Indeks Pelayanan Publik capaian ini sebesar 98 persen dengan realisasi 88,53 persen tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar 80 persen;
 - b. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) capaian ini sebesar 89,3% dengan realisasi 80,38 tidak mencapai target tahunan sebesar 90;

- c. KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir Capaian 3 Kegiatan dengan realisasi 75% tidak mencapai target sebanyak 4 kegiatan dikarenakan PDPB di tahun 2025 hanya dilakukan 3 kali penetapan.
3. Terdapat 44 (empat puluh empat) indikator kinerja yang capaiannya 100% sampai dengan Tahun 2025, dengan kata lain sesuai dengan target perjanjian kinerja.
4. Realisasi penyerapan anggaran KPU Kota Bontang Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp5.965.101.910,-** (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus satu ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dari pagu **Rp6.000.033.000,-** (enam milyar tiga puluh tiga ribu rupiah) atau **99,42 persen** dan KPU Kota Bontang mencapai target Rincian Output.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Bontang pada tahun berikutnya berikutnya, antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sehingga untuk tahun berikutnya dapat sesuai dengan target;
2. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Kota Bontang tahun 2024;
3. Memaksimalkan SDM yang ada dalam penggunaan sarana dan prasarana sehingga pelayanan tidak terhambat/terendala.
4. Memelihara sarana dan prasarana yang ada untuk kelancaran tugas pokok dan fungsi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum;
5. terhadap indikator kinerja yang realisasinya melebihi target akan pertahankan sehingga untuk tahun selanjutnya tidak mengalami penurunan.

Sekretariat KPU Kota Bontang dapat memaksimalkan semua potensi yang ada sehingga capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat sesuai dengan target bahkan melampaunya.



LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Jl. Awang Long No. 68 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara
Kota Bontang - Kalimantan Timur 75311

Telp. (0548)20163, 20232

Email. kota_bontang@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Rahmadhany

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Bontang

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Muzaroby Renfly

Jabatan : Ketua KPU Kota Bontang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bontang, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(Muzaroby Renfly)

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(Bambang Rahmadhany)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

Jl. Awang Long No. 68 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara
Kota Bontang - Kalimantan Timur 75311

Telp. (0548)20163, 20232

Email. Kota_bontang@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Bontang

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
1.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan		
	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Keputusan KPU Kota Bontang yang disusun dengan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman teknis	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
		Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
2.	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih		
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang dalam Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
3.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan		
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan	Persentase KPU Kota Bontang Memfasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	

No	Sasaran Stratis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal Tahapan yang ditetapkan KPU	Kota Bontang secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	100 %
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Tersedianya Data Pemutakhiran Partai Politik di SIPOL secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal		
	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	KPU Kota Bontang Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	10 Kegiatan
		Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	300 orang
B. Program Dukungan Manajemen			
1.	Pengelolaan Keuangan		
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Kota Bontang	Persentase Pejabat perbendaharaan di Satker KPU Kota Bontang yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 laporan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Bontang dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
2.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi		
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan Baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Bontang	90%
	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Bontang	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bontang	B
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase KPU Kota Bontang dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Terlaksananya Hubungan Antar Lembaga dengan Baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Kota Bontang Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	2 Lembaga/ Instansi
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kota Bontang yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU Kota Bontang yang Disediakan secara Valid dan Update	100%
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana			
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU Kota Bontang	Persentase KPU Kota Bontang Menyediakan Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU Kota Bontang yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	10%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU Kota Bontang	100%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU Kota Bontang	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pegawai KPU Kota Bontang		
	Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU Kota Bontang	100%
5. Pemeriksaan Internal KPU Kota Bontang			
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU Kota Bontang	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU Kota Bontang yang Bersih dan Berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU Kota Bontang dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU Kota Bontang	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan barang Milik Negara			
	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Bontang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase KPU Kota Bontang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai	1 laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	
7. Pengelolaan Data dan Informasi			
	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	KPU Kota Bontang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	4 Kegiatan
	Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase KPU Kota Bontang Menerapkan e- Government sesuai SOP yang Berlaku	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU Kota Bontang yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase KPU Kota Bontang yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase KPU Kota Bontang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	100%
		Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kota Bontang yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	20%
9. Pendataan DPT Berkelanjutan			
	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kota Bontang sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%
	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Kota Bontang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	4 Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	KPU Kota Bontang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	4 Kegiatan

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 2.435.652.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 3.363.291.000,-

Bontang, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(Muzaroby Renfly)

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang,



(Bambang Rahmadhany)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**



RENCANA KERJA TAHUNAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, perencanaan, serta tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun yang akan datang. Sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi atas pencapaian tujuan pada pelaksanaan.

Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025.

Demikian yang dapat disampaikan, Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada tahun mendatang.

Bontang, 13 Januari 2025
Ketua KPU Kota Bontang,

Muzarobby Renfly

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025 dalam periode tahunan dimana penyusunannya merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional serta Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang target kinerja berupa keluaran dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam melaksanakan kegiatannya. Dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan Tupoksi KPU Kota Bontang, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi KPU Kota Bontang.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025 yang disusun melalui *e-planning* dan perencanaan kegiatan dan anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA -076.01.2.658919/2025 no

digital stamp: 6283-0320-0801-2828 yang dialokasikan/ditetapkan sebesar Rp. 2.680.616.000 tanggal 2 Desember 2024.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024;
7. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Evaluasi SAKIP;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-kpt/01/kpu/iv/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19/HK.03.1-Kpt/6474/KPU-Kot/VIII/2021 Tanggal 21 Mei 2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2020-2024.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran

- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun dimana acuan ini terdiri atas sasaran strategi, indikator kinerja serta target pencapaiannya dalam 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Komisi Pemilihan Umum tahun 2025.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2025.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1 Sasaran Strategis

Visi Indonesia 2025 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI, KPU Kota Bontang berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kota Bontang terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang akan dicapai pada periode 2025- 2029 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

2.2 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

Indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Tabel 2.2.1
Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Bontang 2025

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas				
		Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kota Bontang yang berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan riset kepemiluan	85%
		Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	89
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA
2. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.				
		Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
			Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
			Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	77%
			Persentase KPU Kota Bontang Yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Bontang dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Bontang.	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2025 disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2.2
Target Kinerja program dukungan Manajemen Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi				
		Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik.	Penyusunan regulasi logistik pemilu	85%
			Penyusunan Kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%
			Pengolahan data dan sistem informasi logistik	100%
		Pengelolaan pengadaan Logistik.	Persentase Penyusunan dokumen persiapan pengadaan dan pendistribusian.	100%
			Pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	100%
			Analisa penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	100%
			Persentase Sarana dan prasarana keperluan pemilu	100%
			Jumlah Penyusunan Laporan logistik pemilu	1 dok
			Penyusunan Startegi dan kebijakan Pengadaan Barang dan jasa	100%
			Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia	100%
			Supervisi, monitoring dan inventarisasi pengadaan barang dan jasa	100%
			Pengelolaan, evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik	100%
			Fasilitasi pelaksanaan dan Pelatihan Pengguna SPPE	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Fasilitasi Pengelolaan dan Pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa.	100%
			Fasilitasi pendampingan, konsultasi dan bimbingan tekhnis pengadaan barang/ jasa.	100%
		Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Dokumentasi Logistik pemilu	100%
			Fasilitasi ketatausahaan Biro	100%
2. Penguatan Kualitas perundangan-undangan				
	Kebijakan bidang politik	Kajian pembentukan peraturan perundang-undangan	100%	
	Penguatan Kualitas perundang-undangan	Penyusunan peraturan perundang-undangan	100%	
3. Hubungan Masyarakat,Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
	Fasilitasi dan pembinaan Lembaga	Fasilitasi Peliputan dan Pendokumentasian	100%	
		Fasilitasi Humas dan dan Pustaka	100%	
		Fasilitasi Informasi Publik dan Fasilitasi Peliputan dan Pendokumentasian	100%	
		Jumlah Media Sosial	20	
	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar	Fasilitasi Pelaksanaan hubungan antar lembaga	100%	
	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	95%	
4. Advokasi dan Sengketa Hukum				
	Jumlah Layanan Bantuan lembaga hukum	Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	
	Penyuluhan Hukum	Fasilitasi kajian dan Pendapat hukum dalam permasalahan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Fasilitasi Pengadministrasian Dokumen Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa serta Pendapat Hukum dalam Permasalahan Pemilu/Pemilihan.	100%
5. Tekhnis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
	- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga - Fasilitasi Pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, daerah pemilihan		Fasilitasi Pengelolaan desain surat suara, dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.	100%
6. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal				
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		Persiapan Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	100%
			Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal.	100%
7. Program Dukungan Manajemen				
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Kajian/Analisa Permasalahan Pengelolaan Keuangan	100%
			Pengelolaan Keuangan Berbasis Sistem Informasi	100%
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Administrasi Perbendaharaan	100%
			Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai	100%
			Pelayanan Ketatausahaan Dokumen Keuangan	100%
			Penyusunan Laporan Keuangan	100%
			Penatausahaan Barang Milik Negara	100%
			Pengelolaan Simak BMN (UAPB dan E-1)	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Pengelolaan Simak UAKPB (Unit Akutansi Kuas Pengguna Barang)	100%
			Penghapusan Barang Milik Negara	100%
			Tuntutan ganti rugi (TGR)	100%
8. Manajemen Perencanaan dan Organisasi				
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pengelolaan Bisnis Proses dan Prosedur Operasi Standar Organisasi	100%
			Pengelolaan Standar Pelayanan (Service Level Agreement)	100%
			Evaluasi Pengelolaan Layanan Administrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi.	100%
			Penyusunan Uraian Tugas dan Peta Jabatan Struktural Organisasi dan Tata Kerja KPU	100%
			Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kelembagaan dan Organisasi	100%
			Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan KPU	100%
			Fasilitasi Program Reformasi Birokrasi	100%
			Fasilitasi Administrasi Kerjasama KPU	100%
			Fasilitasi Kerjasama dalam rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	100%
			Pengelolaan Arsip dan/atau dokumen Pemilu	100%
			Fasilitasi Dokumen Rapat	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
		- Layanan Manajemen Kinerja Internal - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pemantauan pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Realisasi capaian Program/ Kegiatan/Anggaran	100%
			Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	100%
			Pembinaan Kinerja Anggaran Tingkat Satker	100%
			Fasilitasi Rapat Pimpinan/FGD/Konsinyering	100%
			Analisis Capaian Kinerja	100%
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	100%
			Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian Kinerja	100%
			Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi	100%
			Penyusunan Bahan Masukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	100%
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	100%
			Pengelolaan Program/Kegiatan/Anggaran	100%
			Supervisi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Anggaran	100%
9. Pengelolaan Sumber Daya Manusia				
	- Layanan Manajemen SDM Internal (Orang,Layanan) - Layanan Manajemen SDM (Orang)		Proses Seleksi Calon Anggota KPU	100%
			Pembentukan/ Pengelolaan Badan Adhock dan data anggota KPU	100%
			Penilaian Kinerja Pegawai	100%
			Penegakkan Disiplin Pegawai	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Fasiitasi Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	100%
10. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana				
	- Layanan Dukungan manajemen Internal - Layanan Perkantoran - Layanan sarana dan prasarana Internal - Layanan sarana internal	Operasional dan Pemeliharaan perkantoran	100%	
		Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100%	
		Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	100%	
11. Pemeriksaan Internal KPU				
	- Layanan Manajemen Kinerja Internal - Layanan Audit Internal	Fasilitasi Laporan Hasil Pemeriksaan	100%	
		Fasilitasi Laporan Hasil Reviu RKA-KL	100%	
		Fasilitasi Pemeriksaan Pertanggungjawaban Anggaran	100%	
		Fasilitasi Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100%	
		Fasilitasi Pengendalian Gratifikasi (LHKPN/ASN,aksi PPK WBS,Z1)	100%	
		Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	100%	
		Monitoring/Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	100%	
		Fasilitasi Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan Apip KPU	100%	
		Bimbingan Tekhnis/Sosialisasi Implementasi Aplikasi SPIP	100%	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
			Pemantauan dan Evaluasi Tindakanjult Hasil Pemeriksaan BPK,BPKP dan Inspektorat	100%
12. Data dan Informasi				
		- Layanan Dukungan Manajemen Internal - Layanan Data dan Infromasi	Layanan Operasional dan Pelayanan IT	1 Lokasi
			Pemeliharaan Infrastruktur IT	98%
13. Pendataan DPT Berkelanjutan				
		- Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga,Unit Kerja,Tim) - Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	100%
			Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	100%

2.3 Pendanaan

Dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja KPU Kota Bontang tahun 2025 perlu sumber dana, baik sumber dana untuk kegiatan utama dan/ atau kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun gambaran dana yang dibutuhkan sebagai berikut.

Tabel 2.3.1
Pendanaan Target Indikator Kinerja KPU Kota Bontang
Tahun 2025

Kode Akun	Indikator	Pagu
3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	-
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	-
3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	-
7016	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	-

Kode Akun	Indikator	Pagu
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.379.659.000
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	300.957.000
6634	Data dan Informasi	-
7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	-
Total		2.680.616.000

Catatan: Pendanaan 20025 diatas merupakan Dipa Awal, Pagu – Masih menunggu revisi Dipa dari KPU RI

BAB III

PENUTUP

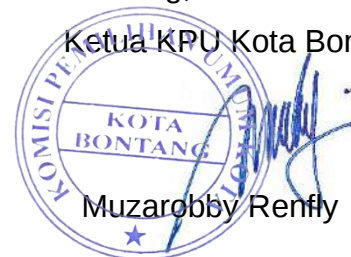
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan umum Kota Bontang tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tahun 2024. Rencana kinerja tahunan tahun 2025 disusun secara koordinasi dari masing-masing unit dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang pada Tahun 2025.

Bontang, 13 Januari 2025

Ketua KPU Kota Bontang

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bontang. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Muzarobby Renfly' is printed in black text.

Muzarobby Renfly

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 1 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	40,719,755,000	0	14,195,176,325	11,831,379,475	26,026,555,800	63.92 %	14,693,199,200
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	38,034,219,000	0	11,731,688,585	11,682,271,193	23,413,959,778	61.56 %	14,620,259,222
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	25,657,790,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,196,057
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000338. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B TANPA SUB KOMPONERN	25,657,789,000	0	0	11,211,593,943	11,211,593,943	43.70 %	14,446,195,057
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	90,000,000	0	0	0	0	0.00 %	90,000,000
000344. Belanja Keperluan Perkantoran	90,000,000	0	0	0	0	0.00 %	90,000,000
521211 Belanja Bahan	10,697,230,000	0	0	3,148,689,930	3,148,689,930	29.43 %	7,548,540,070
000345. Belanja Bahan	10,697,230,000	0	0	3,148,689,930	3,148,689,930	29.43 %	7,548,540,070
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	927,334,000	0	0	32,848,000	32,848,000	3.54 %	894,486,000
000346. Belanja Honor Output Kegiatan	927,334,000	0	0	32,848,000	32,848,000	3.54 %	894,486,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,910,674,000	0	0	1,139,830,000	1,139,830,000	59.66 %	770,844,000
000347. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,910,674,000	0	0	1,139,830,000	1,139,830,000	59.66 %	770,844,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	806,481,000	0	0	806,480,155	806,480,155	100.00	845
000395. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	806,481,000	0	0	806,480,155	806,480,155	100.00	845
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	68,000,000	0	0	57,951,250	57,951,250	85.22 %	10,048,750
000348. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	68,000,000	0	0	57,951,250	57,951,250	85.22 %	10,048,750
522141 Belanja Sewa	420,300,000	0	0	9,098,000	9,098,000	2.16 %	411,202,000
000349. Belanja Sewa	420,300,000	0	0	9,098,000	9,098,000	2.16 %	411,202,000
522151 Belanja Jasa Profesi	953,200,000	0	0	213,300,000	213,300,000	22.38 %	739,900,000
000350. Belanja Jasa Profesi	953,200,000	0	0	213,300,000	213,300,000	22.38 %	739,900,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 2 dari 15

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,420,149,000	0	0	3,314,387,032	3,314,387,032	74.98 %	1,105,761,968
	000351. Belanja Jasa Lainnya	4,420,149,000	0	0	3,314,387,032	3,314,387,032	74.98 %	1,105,761,968
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361,200,000	0	0	36,237,080	36,237,080	10.03 %	324,962,920
	000352. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361,200,000	0	0	36,237,080	36,237,080	10.03 %	324,962,920
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,116,147,000	0	0	1,428,192,496	1,428,192,496	45.83 %	1,687,954,504
	000353. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,116,147,000	0	0	1,428,192,496	1,428,192,496	45.83 %	1,687,954,504
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,034,770,000	0	0	614,800,000	614,800,000	59.41 %	419,970,000
	000354. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,034,770,000	0	0	614,800,000	614,800,000	59.41 %	419,970,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	560,040,000	0	0	253,780,000	253,780,000	45.31 %	306,260,000
	000355. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	560,040,000	0	0	253,780,000	253,780,000	45.31 %	306,260,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292,264,000	0	0	156,000,000	156,000,000	53.38 %	136,264,000
	000356. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292,264,000	0	0	156,000,000	156,000,000	53.38 %	136,264,000
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,384,645,000	0	820,778,270	453,566,450	1,274,344,720	92.03 %	110,300,280
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1,356,734,000	0	794,208,370	453,566,450	1,247,774,820	91.97 %	108,959,180
	QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1,092,271,000	0	568,983,320	435,478,450	1,004,461,770	91.96 %	87,809,230
111	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	1,092,271,000	0	568,983,320	435,478,450	1,004,461,770	91.96 %	87,809,230
111.0A	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	400,605,000	0	350,992,120	30,582,500	381,574,620	95.25 %	19,030,380
521211	Belanja Bahan	129,433,000	0	82,151,900	30,582,500	112,734,400	87.10 %	16,698,600
	000001. Belanja Bahan	129,433,000	0	82,151,900	30,582,500	112,734,400	87.10 %	16,698,600
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	55,050,000	0	55,050,000	0	55,050,000	100.00	0
	000003. 1) Pengarah (5 org x 3 bln x 1 keg)	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	100.00	0
	000004. 2) Penanggungjawab (1 org x 3 bln x 1 keg)	4,350,000	0	4,350,000	0	4,350,000	100.00	0
	000005. 3) Ketua1 (org x 3 bln x 1 keg)	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000006. 4) Sekretaris (1 org x 3 bln x 1 keg)	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
	000007. 5) Anggota (7 org x 3 bln x 1 keg)	19,950,000	0	19,950,000	0	19,950,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	215,722,000	0	213,790,220	0	213,790,220	99.10 %	1,931,780

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 3 dari 15

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000008. Belanja Perjalanan Biasa	215,722,000	0	213,790,220	0	213,790,220	99.10 %	1,931,780
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
	000009. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
111.0B	Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Penganggaran, Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran	51,672,000	0	48,864,200	0	48,864,200	94.57 %	2,807,800
521211	Belanja Bahan	9,811,000	0	9,043,300	0	9,043,300	92.18 %	767,700
	000010. Belanja Bahan	9,811,000	0	9,043,300	0	9,043,300	92.18 %	767,700
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,861,000	0	16,820,900	0	16,820,900	89.18 %	2,040,100
	000011. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,861,000	0	16,820,900	0	16,820,900	89.18 %	2,040,100
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	100.00	0
	000012. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	23,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000	100.00	0
111.0C	Konsolidasi Nasional Program Kerja dan Anggaran, Penguatan Kelembagaan dan Organisasi	158,508,000	0	96,919,500	60,560,200	157,479,700	99.35 %	1,028,300
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158,508,000	0	96,919,500	60,560,200	157,479,700	99.35 %	1,028,300
	000013. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	158,508,000	0	96,919,500	60,560,200	157,479,700	99.35 %	1,028,300
111.0D	Layanan Perkantoran	199,918,000	0	72,207,500	62,767,750	134,975,250	67.52 %	64,942,750
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	40,738,000	0	9,609,300	11,354,900	20,964,200	51.46 %	19,773,800
	000375. Belanja Keperluan Perkantoran	29,862,000	0	9,609,300	11,354,900	20,964,200	70.20 %	8,897,800
	000386. Penggantian Inventaris Lama	10,876,000	0	0	0	0	0.00 %	10,876,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	0	65,000	0	65,000	13.00 %	435,000
	000376. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	0	65,000	0	65,000	13.00 %	435,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,100,000	0	6,392,000	9,588,000	15,980,000	63.67 %	9,120,000
	000377. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,100,000	0	6,392,000	9,588,000	15,980,000	63.67 %	9,120,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	25,000,000	0	21,075,000	0	21,075,000	84.30 %	3,925,000
	000378. Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti	25,000,000	0	21,075,000	0	21,075,000	84.30 %	3,925,000
522111	Belanja Langganan Listrik	155,000	0	82,600	0	82,600	53.29 %	72,400
	000379. Belanja Langganan Listrik	155,000	0	82,600	0	82,600	53.29 %	72,400
522112	Belanja Langganan Telepon	2,000,000	0	322,400	42,700	365,100	18.25 %	1,634,900

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 4 dari 15

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000380. Belanja Langganan Telepon	2,000,000	0	322,400	42,700	365,100	18.26 %	1,634,900
522113	Belanja Langganan Air	1,275,000	0	961,100	0	961,100	75.38 %	313,900
	000381. Belanja Langganan Air	1,275,000	0	961,100	0	961,100	75.38 %	313,900
522191	Belanja Jasa Lainnya	14,900,000	0	7,684,800	2,166,900	9,851,700	66.12 %	5,048,300
	000382. Belanja Jasa Internet dan Layanan Zoom	14,900,000	0	7,684,800	2,166,900	9,851,700	66.12 %	5,048,300
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,600,000	0	2,044,000	273,000	2,317,000	11.82 %	17,283,000
	000383. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,600,000	0	2,044,000	273,000	2,317,000	11.82 %	17,283,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64,650,000	0	23,971,300	33,427,750	57,399,050	88.78 %	7,250,950
	000384. Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor	64,650,000	0	23,971,300	33,427,750	57,399,050	88.78 %	7,250,950
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,000,000	0	0	5,914,500	5,914,500	98.58 %	85,500
	000385. Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	6,000,000	0	0	5,914,500	5,914,500	98.58 %	85,500
111.0E	INSENTIF PEMILU	281,568,000	0	0	281,568,000	281,568,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	281,568,000	0	0	281,568,000	281,568,000	100.00	0
	000394. Belanja Honor Output Kegiatan	281,568,000	0	0	281,568,000	281,568,000	100.00	0
QGE.003 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan		15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
052 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan		15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
052.0A	Diklat Teknis, Pengelolaan Pelatihan Teknis, Monitoring dan Supervisi, Evaluasi	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
	000020. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,863,000	0	15,862,100	0	15,862,100	99.99 %	900
QGE.004 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		248,600,000	0	209,362,950	18,088,000	227,450,950	91.49 %	21,149,050
052 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		248,600,000	0	209,362,950	18,088,000	227,450,950	91.49 %	21,149,050
052.0A	Fasilitasi Kehumasan, Sosialisasi, Kerjasama Hubungan Lembaga, Fasilitasi Layanan Pers, PPID	248,600,000	0	209,362,950	18,088,000	227,450,950	91.49 %	21,149,050
521211	Belanja Bahan	153,600,000	0	141,009,750	6,828,000	147,837,750	96.25 %	5,762,250
	000302. Belanja Bahan	153,600,000	0	141,009,750	6,828,000	147,837,750	96.25 %	5,762,250
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,000,000	0	13,353,200	11,260,000	24,613,200	61.53 %	15,386,800
	000370. Belanja Barang Non Operasional Lainnya	40,000,000	0	13,353,200	11,260,000	24,613,200	61.53 %	15,386,800

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522191	Belanja Jasa Lainnya	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
	000014. Sosialisasi melalui Media Massa	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
	000016. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	100.00	0
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		27,911,000	0	26,569,900	0	26,569,900	95.20 %	1,341,100
RAN.001 Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu		9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
110 Pengelolaan Sarana IT KPU		9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
110.0A	Rapat, identifikasi IT, koordinasi lintas sektor, ATK	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
521211	Belanja Bahan	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
	000024. Belanja Bahan	9,811,000	0	8,562,400	0	8,562,400	87.27 %	1,248,600
RAN.002 Pengelolaan Sarana IT Pemilu		18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
052 Pengelolaan Sarana IT Pemilu		18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
052.0A	Rapat identifikasi IT, KOORDINASI LINTAS SEKTOR, ATK	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
	000022. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,100,000	0	18,007,500	0	18,007,500	99.49 %	92,500
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	7,960,866,000	0	7,955,362,400	0	7,955,362,400	99.93 %	5,503,600
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		7,960,866,000	0	7,955,362,400	0	7,955,362,400	99.93 %	5,503,600
QGE.001 Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc		80,760,000	0	80,758,500	0	80,758,500	100.00	1,500
051 Fasilitas Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc		80,760,000	0	80,758,500	0	80,758,500	100.00	1,500
051.0A	Rapat - rapat, ATK, perlengkapan dukungan lainnya, Evaluasai	80,760,000	0	80,758,500	0	80,758,500	100.00	1,500
521211	Belanja Bahan	62,840,000	0	62,838,500	0	62,838,500	100.00	1,500
	000320. Belanja Bahan	62,840,000	0	62,838,500	0	62,838,500	100.00	1,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,920,000	0	17,920,000	0	17,920,000	100.00	0
	000321. Supervisi/Monitoring Keuangan ke Badan Adhoc	17,920,000	0	17,920,000	0	17,920,000	100.00	0
QGE.002 Honorarium Badan Adhoc		5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0
051 Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Badan Adhoc		5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0
051.0A	Honorarium Badan Adhoc	5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 6 dari 15

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,390,300,000	0	5,390,300,000	0	5,390,300,000	100.00	0
	000046. Anggota (30 org x 3 bln x 1 keg)	117,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000	100.00	0
	000048. Sekretaris (15 org x 3 bln x 1 keg)	51,750,000	0	51,750,000	0	51,750,000	100.00	0
	000049. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis (90 org x 3 bln x 1 keg)	94,500,000	0	94,500,000	0	94,500,000	100.00	0
	000051. Ketua (532 org x 1 keg)	638,400,000	0	638,400,000	0	638,400,000	100.00	0
	000052. Anggota (3192 org x 1 keg)	3,511,200,000	0	3,511,200,000	0	3,511,200,000	100.00	0
	000053. Pengamanan TPS/Satlinmas (1064 org x 1 keg)	744,800,000	0	744,800,000	0	744,800,000	100.00	0
	000054. Ketua (3 ORG X 3 BLN X 1 KEG)	22,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000	100.00	0
	000055. Anggota (12 ORG X 3 BLN X 1 KEG)	79,200,000	0	79,200,000	0	79,200,000	100.00	0
	000057. Sekretaris (3 org x 3 bln x 1 keg)	16,650,000	0	16,650,000	0	16,650,000	100.00	0
	000058. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis (6 org x 3 bln x 1 keg)	23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000	100.00	0
	000059. Tenaga Adm PPK (6 org x 3 bln x 1 keg)	23,400,000	0	23,400,000	0	23,400,000	100.00	0
	000061. Ketua (15 org x 3 bln x 1 keg)	67,500,000	0	67,500,000	0	67,500,000	100.00	0
QGE.003 Dukungan Operasional Badan Adhoc		2,489,806,000	0	2,484,303,900	0	2,484,303,900	99.78 %	5,502,100
051 Dukungan Operasional Badan Adhoc		2,489,806,000	0	2,484,303,900	0	2,484,303,900	99.78 %	5,502,100
051.0A	Dukungan Operasional Badan Adhoc, Transport, Perjalanan Dinas, Sewa, dll	667,000,000	0	664,000,000	0	664,000,000	99.55 %	3,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	667,000,000	0	664,000,000	0	664,000,000	99.55 %	3,000,000
	000038. PPK (3 PKT X 3 BLN)	45,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	93.33 %	3,000,000
	000039. PPS (15 PKT X 3 BLN)	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000	100.00	0
	000040. TPS	532,000,000	0	532,000,000	0	532,000,000	100.00	0
051.0B	DUKUNGAN OPERASIONAL BADAN ADHOC	1,822,806,000	0	1,820,303,900	0	1,820,303,900	99.86 %	2,502,100
521211	Belanja Bahan	505,102,000	0	505,102,000	0	505,102,000	100.00	0
	000272. Konsumsi Bimtek PPK, PPS, KPPS	475,402,000	0	475,402,000	0	475,402,000	100.00	0
	000372. Konsumsi Penghitungan Ulang Surat Suara	29,700,000	0	29,700,000	0	29,700,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,001,000	0	9,000,000	0	9,000,000	99.99 %	1,000
	000274. Sewa Ruang Pertemuan PPK/PPS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 7 dari 15

Uraian			Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
					Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000292. Rohaniwan		9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi		2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
	000275. Narasumber		2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		130,128,000	0	130,126,900	0	130,126,900	100.00	1,100
	000301. Belanja Perjalanan Dinas Biasa		109,282,000	0	109,281,400	0	109,281,400	100.00	600
	000371. Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS)		20,846,000	0	20,845,500	0	20,845,500	100.00	500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1,176,075,000	0	1,176,075,000	0	1,176,075,000	100.00	0
	000277. Supervisi/monitoring		49,875,000	0	49,875,000	0	49,875,000	100.00	0
	000279. Bantuan Transport		2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
	000281. Bantuan transport		6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	100.00	0
	000283. Bantuan Transport (3724 x 2 Keg)		1,117,200,000	0	1,117,200,000	0	1,117,200,000	100.00	0
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu		1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
	QGE.001 Persiapan Kampanye Pemilu		1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
	051 Persiapan Kampanye Pemilu		1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
	051.OA Penyusunan rencana kerja, rapat - rapat, koordinasi dengan pihak terkait		1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
	521211 Belanja Bahan		1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
	000285. Belanja Bahan		1,946,000	0	1,945,800	0	1,945,800	99.99 %	200
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik		1,542,895,000	0	1,483,261,865	17,110,800	1,500,372,665	97.24 %	42,522,335
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1,542,895,000	0	1,483,261,865	17,110,800	1,500,372,665	97.24 %	42,522,335
	QGE.001 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu		24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu		24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
	051.OA Rapat, penyusunan bahan, koordinasi lintas sektor, ATK		24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
	521211 Belanja Bahan		24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
	000074. Belanja Bahan		24,843,000	0	24,842,850	0	24,842,850	100.00	150
	QGE.002 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1,501,881,000	0	1,442,249,315	17,110,800	1,459,360,115	97.17 %	42,520,885

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 8 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,501,881,000	0	1,442,249,315	17,110,800	1,459,360,115	97.17 %	42,520,885
051.0B Konsumsi Tungsura dan Rekapitulasi Suara	444,042,000	0	431,794,450	0	431,794,450	97.24 %	12,247,550
521211 Belanja Bahan	280,782,000	0	280,782,000	0	280,782,000	100.00	0
000312. PPK	2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	100.00	0
000313. PPS (15 PPS x 1 hari x 6 org)	5,130,000	0	5,130,000	0	5,130,000	100.00	0
000314. KPSS (532 TPS x 1 hari x 9 org)	272,916,000	0	272,916,000	0	272,916,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	40,750,000	0	40,750,000	81.50 %	9,250,000
000316. Santunan Bagi Penyelenggara Pemilu	50,000,000	0	40,750,000	0	40,750,000	81.50 %	9,250,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,700,000	0	28,702,450	0	28,702,450	90.54 %	2,997,550
000323. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,700,000	0	28,702,450	0	28,702,450	90.54 %	2,997,550
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81,560,000	0	81,560,000	0	81,560,000	100.00	0
000317. Rekapitulasi Tingkat KPU	81,560,000	0	81,560,000	0	81,560,000	100.00	0
051.BA Penyusunan Strategi dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu dan Pemilihan	32,200,000	0	32,105,650	0	32,105,650	99.71 %	94,350
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,200,000	0	32,105,650	0	32,105,650	99.71 %	94,350
000325. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,200,000	0	32,105,650	0	32,105,650	99.71 %	94,350
051.BB Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu	111,210,000	0	111,210,000	0	111,210,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
000235. Tenaga Pendukung PPKom	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,710,000	0	100,710,000	0	100,710,000	100.00	0
000237. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100,710,000	0	100,710,000	0	100,710,000	100.00	0
051.BC Penyediaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu	869,429,000	0	867,139,215	0	867,139,215	99.74 %	2,289,785
521211 Belanja Bahan	70,429,000	0	70,428,600	0	70,428,600	100.00	400
000319. Belanja Bahan	70,429,000	0	70,428,600	0	70,428,600	100.00	400
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,000,000	0	8,247,300	0	8,247,300	82.47 %	1,752,700
000239. Dukungan Internet, Listrik dan Air di gudang logistik	10,000,000	0	8,247,300	0	8,247,300	82.47 %	1,752,700
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	280,000,000	0	279,465,260	0	279,465,260	99.81 %	534,740

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 9 dari 15

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000240. Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya	280,000,000	0	279,465,260	0	279,465,260	99.81 %	534,740
522191	Belanja Jasa Lainnya	509,000,000	0	508,998,055	0	508,998,055	100.00	1,945
	000241. Tenaga Pengamanan Gudang Logistik (6 org x 3 bln)	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000	100.00	0
	000242. Pengelolaan dan Distribusi Logistik	446,000,000	0	445,998,055	0	445,998,055	100.00	1,945
051.BD	PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU	45,000,000	0	0	17,110,800	17,110,800	38.02 %	27,889,200
521211	Belanja Bahan	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
	000388. Belanja Bahan	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000387. Belanja Honor Output Kegiatan	20,000,000	0	0	0	0	0.00 %	20,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	17,110,800	17,110,800	85.55 %	2,889,200
	000389. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	0	0	17,110,800	17,110,800	85.55 %	2,889,200
QGE.003 Pengelolaan Dokumentasi Logistik		16,171,000	0	16,169,700	0	16,169,700	99.99 %	1,300
051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik		16,171,000	0	16,169,700	0	16,169,700	99.99 %	1,300
051.OA	Rapat Penyusunan laporan, ATK, penggandaan, koordinasi	16,171,000	0	16,169,700	0	16,169,700	99.99 %	1,300
521211	Belanja Bahan	4,729,000	0	4,728,600	0	4,728,600	99.99 %	400
	000076. Belanja Bahan	4,729,000	0	4,728,600	0	4,728,600	99.99 %	400
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,442,000	0	11,441,100	0	11,441,100	99.99 %	900
	000077. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,442,000	0	11,441,100	0	11,441,100	99.99 %	900
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,458,799,000	0	1,448,297,650	0	1,448,297,650	99.28 %	10,501,350
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		1,458,799,000	0	1,448,297,650	0	1,448,297,650	99.28 %	10,501,350
QGE.001 Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		34,843,000	0	34,842,300	0	34,842,300	100.00	700
051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara		34,843,000	0	34,842,300	0	34,842,300	100.00	700
051.OA	Rapat, penyusunan materi, koordinasi lintas sektor, ATK	34,843,000	0	34,842,300	0	34,842,300	100.00	700
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18,350,000	0	18,350,000	0	18,350,000	100.00	0
	000094. Pengarah (5 org x 1 bln)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
	000095. Penanggung jawab (1 org x 1 bln)	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 10 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000096. Ketua (1 org x 1 bln)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000097. Sekretaris (1 org x 1 bln)	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
000098. Anggota (7 org x 1 bln)	6,650,000	0	6,650,000	0	6,650,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,493,000	0	16,492,300	0	16,492,300	100.00	700
000099. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,493,000	0	16,492,300	0	16,492,300	100.00	700
QGE.002 Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1,416,529,000	0	1,406,028,450	0	1,406,028,450	99.26 %	10,500,550
051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1,416,529,000	0	1,406,028,450	0	1,406,028,450	99.26 %	10,500,550
051.0A Pelaksanaan tungsura, rekap berjenjang, pengiriman logistik ke Kab/Kota (gudang), bimtek badan adhoc	1,416,529,000	0	1,406,028,450	0	1,406,028,450	99.26 %	10,500,550
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,351,000,000	0	1,340,500,000	0	1,340,500,000	99.22 %	10,500,000
000288. PPK (3 PPK x 7 Hari)	21,000,000	0	10,500,000	0	10,500,000	50.00 %	10,500,000
000290. TPS	1,330,000,000	0	1,330,000,000	0	1,330,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65,529,000	0	65,528,450	0	65,528,450	100.00	550
000326. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65,529,000	0	65,528,450	0	65,528,450	100.00	550
QGE.003 Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
051.0A Rapat, penyusunan laporan, ATK, penggandaan, koordinasi	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
521211 Belanja Bahan	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
000100. Belanja Bahan	7,427,000	0	7,426,900	0	7,426,900	100.00	100
CQ.6981 Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	14,619,000	0	9,388,100	0	9,388,100	64.22 %	5,230,900
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	14,619,000	0	9,388,100	0	9,388,100	64.22 %	5,230,900
QGE.001 Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
051 Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
051.0A PENYIAPAN SUMPAH JANJI	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
521211 Belanja Bahan	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
000111. Belanja Bahan	5,485,000	0	5,484,500	0	5,484,500	99.99 %	500
QGE.002 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 11 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051 Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
051.0A PENYIAPAN SUMPAH JANJI	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
000112. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,134,000	0	3,903,600	0	3,903,600	42.74 %	5,230,400
CQ.6982 Penetapan Hasil Pemilu	12,659,000	0	12,654,500	0	12,654,500	99.96 %	4,500
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	12,659,000	0	12,654,500	0	12,654,500	99.96 %	4,500
QGE.001 Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	2,634,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.93 %	1,900
051 Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	2,634,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.93 %	1,900
051.0A Persiapan Logistik dan Penetapan Hasil Pemilu	2,634,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.93 %	1,900
521211 Belanja Bahan	2,633,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.97 %	900
000117. Belanja Bahan	2,633,000	0	2,632,100	0	2,632,100	99.97 %	900
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000118. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
QGE.003 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10,025,000	0	10,022,400	0	10,022,400	99.97 %	2,600
051 Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10,025,000	0	10,022,400	0	10,022,400	99.97 %	2,600
051.0A Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10,025,000	0	10,022,400	0	10,022,400	99.97 %	2,600
521211 Belanja Bahan	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	100.00	0
000113. Belanja Bahan	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,793,000	0	7,792,400	0	7,792,400	99.99 %	600
000114. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,793,000	0	7,792,400	0	7,792,400	99.99 %	600
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000115. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000116. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
WAProgram Dukungan Manajemen	2,685,536,000	0	2,463,487,740	149,108,282	2,612,596,022	97.28 %	72,939,978
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 12 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628
001 Gaji dan Tunjangan	2,548,374,000	0	2,326,673,090	149,108,282	2,475,781,372	97.15 %	72,592,628
001.0A Gaji dan Tunjangan	1,581,297,000	0	1,452,785,853	70,175,774	1,522,961,627	96.31 %	58,335,373
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	592,150,000	0	589,276,100	2,873,500	592,149,600	100.00	400
000119. Belanja Gaji Pokok PNS	592,150,000	0	589,276,100	2,873,500	592,149,600	100.00	400
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	10,100	98	10,198	78.45 %	2,802
000120. Belanja Pembulatan Gaji PNS	13,000	0	10,100	98	10,198	78.45 %	2,802
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,520,000	0	42,231,770	287,350	42,519,120	100.00	880
000122. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42,520,000	0	42,231,770	287,350	42,519,120	100.00	880
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	12,985,000	0	12,927,278	57,470	12,984,748	100.00	252
000123. Belanja Tunj. Anak PNS	12,985,000	0	12,927,278	57,470	12,984,748	100.00	252
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	0	32,760,000	0	32,760,000	100.00	0
000124. Belanja Tunj. Struktural PNS	32,760,000	0	32,760,000	0	32,760,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000125. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,611,000	0	3,217,270	0	3,217,270	69.77 %	1,393,730
000126. Belanja Tunj. PPh PNS	4,611,000	0	3,217,270	0	3,217,270	69.77 %	1,393,730
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	35,486,000	0	35,268,540	217,260	35,485,800	100.00	200
000141. Belanja Tunj. Beras PNS	35,486,000	0	35,268,540	217,260	35,485,800	100.00	200
511129 Belanja Uang Makan PNS	105,998,000	0	74,018,000	19,907,000	93,925,000	88.61 %	12,073,000
000127. Belanja Uang Makan PNS	105,998,000	0	74,018,000	19,907,000	93,925,000	88.61 %	12,073,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	25,830,000	0	25,645,000	185,000	25,830,000	100.00	0
000128. Belanja Tunjangan Umum PNS	25,830,000	0	25,645,000	185,000	25,830,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	728,943,000	0	637,431,795	46,648,096	684,079,891	93.85 %	44,863,109
000129. Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	728,943,000	0	637,431,795	46,648,096	684,079,891	93.85 %	44,863,109

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 13 dari 15

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
001.0B	Uang Kehormatan	836,803,000	0	768,501,821	67,766,208	836,268,029	99.94 %	534,971
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	836,803,000	0	768,501,821	67,766,208	836,268,029	99.94 %	534,971
	000130. Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	836,803,000	0	768,501,821	67,766,208	836,268,029	99.94 %	534,971
001.0C	PPPK	130,274,000	0	105,385,416	11,166,300	116,551,716	89.47 %	13,722,284
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	52,000,000	0	51,257,600	0	51,257,600	98.57 %	742,400
	000357. Belanja Gaji Pokok PPPK	52,000,000	0	51,257,600	0	51,257,600	98.57 %	742,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	613	300	913	91.30 %	87
	000358. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	613	300	913	91.30 %	87
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,300,000	0	3,203,600	0	3,203,600	97.08 %	96,400
	000359. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3,300,000	0	3,203,600	0	3,203,600	97.08 %	96,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,795,000	0	1,601,800	0	1,601,800	89.24 %	193,200
	000360. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,795,000	0	1,601,800	0	1,601,800	89.24 %	193,200
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,640,000	0	6,480,000	2,160,000	8,640,000	100.00	0
	000361. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,640,000	0	6,480,000	2,160,000	8,640,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,700,000	0	3,693,420	0	3,693,420	99.82 %	6,580
	000362. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,700,000	0	3,693,420	0	3,693,420	99.82 %	6,580
511626	Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000363. Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,058,000	0	4,847,000	2,368,000	7,215,000	65.25 %	3,843,000
	000364. Belanja Uang Makan PPPK	11,058,000	0	4,847,000	2,368,000	7,215,000	65.25 %	3,843,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000365. Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
	000366. Belanja Uang Lembur PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	49,777,000	0	34,301,383	6,638,000	40,939,383	82.25 %	8,837,617
	000367. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	49,777,000	0	34,301,383	6,638,000	40,939,383	82.25 %	8,837,617

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 14 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
EBA.994 Layanan Perkantoran	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
002.0A LAYANAN PERKANTORAN	137,162,000	0	136,814,650	0	136,814,650	99.75 %	347,350
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	23,550,000	0	23,515,900	0	23,515,900	99.86 %	34,100
000131. Penggantian Inventaris Lama	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000	100.00	0
000132. ATK, Jamuan Makan/Konsumsi, Alat Rumah Tangga, Barang Cetak, Langganan koran/majalah dan Air Minum pegawai, Rapat dengan instansi	20,450,000	0	20,415,900	0	20,415,900	99.83 %	34,100
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000133. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,400,000	0	22,372,000	0	22,372,000	99.88 %	28,000
000134. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22,400,000	0	22,372,000	0	22,372,000	99.88 %	28,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000135. Pakaian ASN, Satpam, Supir dan Pramubakti	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
522111 Belanja Langganan Listrik	23,900,000	0	23,844,900	0	23,844,900	99.77 %	55,100
000136. Belanja Langganan Listrik	23,900,000	0	23,844,900	0	23,844,900	99.77 %	55,100
522112 Belanja Langganan Telepon	550,000	0	533,100	0	533,100	96.93 %	16,900
000368. Belanja Langganan Telepon	550,000	0	533,100	0	533,100	96.93 %	16,900
522113 Belanja Langganan Air	1,750,000	0	1,725,300	0	1,725,300	98.59 %	24,700
000322. Belanja Langganan Air	1,750,000	0	1,725,300	0	1,725,300	98.59 %	24,700
522191 Belanja Jasa Lainnya	13,100,000	0	13,064,450	0	13,064,450	99.73 %	35,550
000137. Belanja Jasa Internet dan Layanan Zoom	13,100,000	0	13,064,450	0	13,064,450	99.73 %	35,550
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,450,000	0	3,406,200	0	3,406,200	98.73 %	43,800
000138. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,450,000	0	3,406,200	0	3,406,200	98.73 %	43,800
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,360,000	0	48,352,800	0	48,352,800	99.99 %	7,200
000139. Servis Kendaraan dan Peralatan Elektronik Kantor	48,360,000	0	48,352,800	0	48,352,800	99.99 %	7,200

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
	000140. Perjalanan Ke KPPN/KPKNL/Kanwil DJPBN	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 1 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,000,033,000	0	5,547,940,292	417,161,618	5,965,101,910	99.42 %	34,931,090
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	2,435,652,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,007,706
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
051.0B TANPA SUB KOMPONERN	2,435,651,000	0	2,405,644,294	0	2,405,644,294	98.77 %	30,006,706
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	6,291,000	0	6,290,500	0	6,290,500	99.99 %	500
521211 Belanja Bahan	252,739,000	0	252,738,900	0	252,738,900	100.00	100
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	22,727,000	0	22,726,500	0	22,726,500	100.00	500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	102,949,000	0	102,948,632	0	102,948,632	100.00	368
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	39,037,000	0	9,036,400	0	9,036,400	23.15 %	30,000,600
522141 Belanja Sewa	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	247,098,000	0	247,097,262	0	247,097,262	100.00	738
522191 Belanja Jasa Lainnya	774,614,000	0	774,613,200	0	774,613,200	100.00	800
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69,031,000	0	69,030,950	0	69,030,950	100.00	50
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	770,054,000	0	770,053,950	0	770,053,950	100.00	50
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	149,808,000	0	149,808,000	0	149,808,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
WA Program Dukungan Manajemen	3,564,381,000	0	3,142,295,998	417,161,618	3,559,457,616	99.86 %	4,923,384
WA.3355 Pengelolaan Keuangan	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 2 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384
001 Gaji dan Tunjangan	3,219,980,000	0	2,947,291,698	270,350,918	3,217,642,616	99.93 %	2,337,384
001.OA Gaji dan Tunjangan	1,745,189,000	0	1,614,108,667	129,045,909	1,743,154,576	99.88 %	2,034,424
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	668,166,000	0	668,165,260	0	668,165,260	100.00	740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,000	0	9,567	0	9,567	95.67 %	433
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	43,981,000	0	43,980,170	0	43,980,170	100.00	830
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	14,274,000	0	14,273,862	0	14,273,862	100.00	138
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	46,800,000	0	46,800,000	0	46,800,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	3,390,000	0	3,389,782	0	3,389,782	99.99 %	218
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	38,166,000	0	38,165,340	0	38,165,340	100.00	660
511129 Belanja Uang Makan PNS	120,061,000	0	96,540,000	21,491,000	118,031,000	98.31 %	2,030,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	24,905,000	0	24,905,000	0	24,905,000	100.00	0
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	785,435,000	0	677,879,686	107,554,909	785,434,595	100.00	405
001.OB Uang Kehormatan	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	0	845,344,500	0	845,344,500	100.00	500
001.OC PPPK	629,446,000	0	487,838,531	141,305,009	629,143,540	99.95 %	302,460
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	250,916,000	0	209,662,999	41,252,100	250,915,099	100.00	901
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	3,979	629	4,608	92.16 %	392
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,306,000	0	15,019,439	2,286,040	17,305,479	100.00	521
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,136,000	0	5,528,021	607,898	6,135,919	100.00	81
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18,090,000	0	14,850,000	3,240,000	18,090,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	18,830,000	0	16,366,920	2,462,280	18,829,200	100.00	800
511626 Belanja Tunjangan Kemahalan PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511628 Belanja Uang Makan PPPK	54,316,000	0	36,756,000	17,264,000	54,020,000	99.46 %	296,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,580,000	0	8,965,000	1,615,000	10,580,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 3 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
512212 Belanja Uang Lembur PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	253,264,000	0	180,686,173	72,577,062	253,263,235	100.00	765
WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344,401,000	0	195,004,300	146,810,700	341,815,000	99.25 %	2,586,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	323,422,000	0	174,025,300	146,810,700	320,836,000	99.20 %	2,586,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	323,422,000	0	174,025,300	146,810,700	320,836,000	99.20 %	2,586,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	323,422,000	0	174,025,300	146,810,700	320,836,000	99.20 %	2,586,000
002.0A LAYANAN PERKANTORAN	248,925,000	0	146,338,800	100,485,500	246,824,300	99.16 %	2,100,700
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	50,541,000	0	24,846,900	23,665,500	48,512,400	95.99 %	2,028,600
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	280,000	0	279,500	0	279,500	99.82 %	500
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,560,000	0	43,060,000	7,500,000	50,560,000	100.00	0
522111 Belanja Langganan Listrik	50,928,000	0	40,968,400	9,924,500	50,892,900	99.93 %	35,100
522112 Belanja Langganan Telepon	368,000	0	287,900	79,800	367,700	99.92 %	300
522113 Belanja Langganan Air	2,519,000	0	2,160,900	358,100	2,519,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	12,431,000	0	11,150,100	1,280,400	12,430,500	100.00	500
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,728,000	0	3,179,000	7,549,000	10,728,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,695,000	0	17,894,000	20,766,000	38,660,000	99.91 %	35,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,875,000	0	2,512,100	29,362,200	31,874,300	100.00	700
002.0B SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH	2,800,000	0	0	2,756,000	2,756,000	98.43 %	44,000
521211 Belanja Bahan	2,800,000	0	0	2,756,000	2,756,000	98.43 %	44,000
002.0C Rapat Koordinasi Nasional KPU	38,584,000	0	4,394,200	33,829,200	38,223,400	99.07 %	360,600
521211 Belanja Bahan	4,000,000	0	0	3,919,200	3,919,200	97.98 %	80,800
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,584,000	0	4,394,200	29,910,000	34,304,200	99.19 %	279,800
002.0D Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
002.0E RAPAT PLENO PDPB TA 2025	26,480,000	0	16,669,900	9,740,000	26,409,900	99.74 %	70,100
521211 Belanja Bahan	10,072,000	0	262,500	9,740,000	10,002,500	99.31 %	69,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,528,000	0	5,527,400	0	5,527,400	99.99 %	600

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

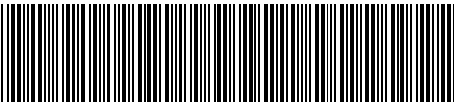
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM

Satuan Kerja : 658919 KPU KOTA BONTANG

Hal 4 dari 4

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,880,000	0	10,880,000	0	10,880,000	100.00	0
002.LC Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	6,623,000	0	6,622,400	0	6,622,400	99.99 %	600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,623,000	0	6,622,400	0	6,622,400	99.99 %	600
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
EBB.951 Layanan Sarana Internal	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
053.0A Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,979,000	0	20,979,000	0	20,979,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658919/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
- 2. Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
- 3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
- 4. Kode>Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG
- Sebesar : Rp. 6.000.033.000 (ENAM MILIAR TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 15

Tanggal : 19 Januari 2026

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	3.564.382.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	2.435.651.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	2.435.651.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 6.000.033.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

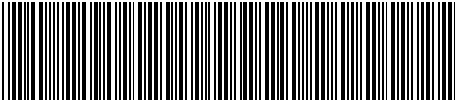
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025

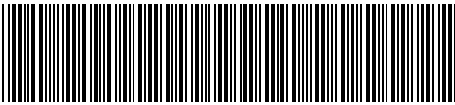


DS:6792-4587-7050-4047

Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	2.435.652.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp.	2.435.652.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.564.381.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	Rp.	3.219.980.000
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	344.401.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6792-4587-7050-4047

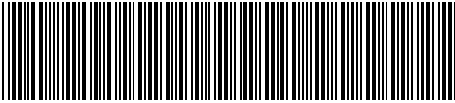
Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

										Halaman : I A. 1
Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							2.435.652.000
Kegiatan	:	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada							2.435.652.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim				2.435.652.000
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.00	Lembaga				2.435.652.000
Program	:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen							3.564.381.000
Kegiatan	:	3355	Pengelolaan Keuangan							3.219.980.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:									
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit				3.219.980.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan				3.219.980.000
Kegiatan	:	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana							344.401.000
	:									
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit				323.422.000
Rincian Output	:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan				323.422.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket				20.979.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit				20.979.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
I B. SUMBER DANA



DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	6.000.033.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	3.564.382.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	2.435.651.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	2.435.651		
(dalam ribuan rupiah)								

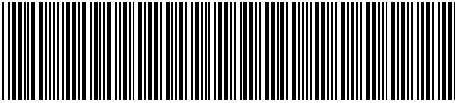
No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHKOTABON 1232/KU.07-NK/64 257CZHEA	IDR USD IDR	2.435.651,00 2.435.651,00	5	2.435.651			

DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG
Kewenangan : (KD)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode/Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG
Kewenangan : (KD)

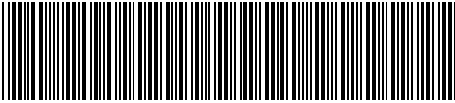
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (16.54 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG)	-	323.422	-	-	-	323.422	16 . 54	
01 RM		-	323.422	-	-	-	323.422	046	
3360.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (16.54 KALIMANTAN TIMUR / KOTA BONTANG)	-	-	20.979	-	-	20.979	16 . 54	
01 RM		-	-	20.979	-	-	20.979	046	
JUMLAH		3.219.980	2.759.073	20.980	-	-	6.000.033		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (658919) KPU KOTA BONTANG

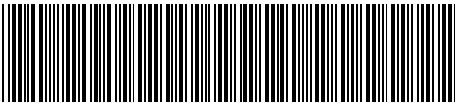
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	658919	KPU KOTA BONTANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	158.951	158.951	158.951	411.690	1.541.536	439.263	438.090	434.123	455.917	184.528	211.480	1.406.554	6.000.033
		BELANJA PEGAWAI	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	178.841	205.224	272.720	202.336	166.810	154.995	1.244.299	3.219.980
		BELANJA BARANG	0	0	0	252.739	1.382.584	260.422	232.866	161.403	253.581	17.718	35.506	162.255	2.759.073
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20.979	0	20.980
		076.01.CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	0	0	0	252.739	1.354.127	231.964	201.599	139.476	222.990	1.256	1.256	30.246	2.435.652
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	252.739	1.354.126	231.964	201.599	139.476	222.990	1.256	1.256	30.246	2.435.651
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		076.01.WA.3355 Pengelolaan Keuangan	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	178.841	205.224	272.720	202.336	166.810	154.995	1.244.299	3.219.980
		51 BELANJA PEGAWAI	158.951	158.951	158.951	158.951	158.951	178.841	205.224	272.720	202.336	166.810	154.995	1.244.299	3.219.980
		076.01.WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	0	0	0	0	28.459	28.459	31.267	21.927	30.592	16.462	55.229	132.009	344.401
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	28.459	28.459	31.267	21.927	30.592	16.462	34.250	132.009	323.422
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.979	0	20.979

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
IV A. B L O K I R



DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [658919] KPU KOTA BONTANG

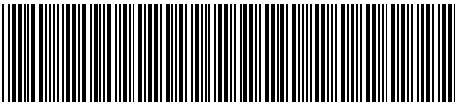
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.658919/2025
IV B. C A T A T A N



DS:6792-4587-7050-4047

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [658919] KPU KOTA BONTANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001